

**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL
WAY KAMBAS (TNWK) MENUJU DESA WISATA
BERKELANJUTAN**

(Tesis)

Oleh

**Fauzi Nur Dewangga
NPM 1820051005**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL
WAY KAMBAS (TNWK) MENUJU DESA WISATA
BERKELANJUTAN**

Oleh

FAUZI NUR DEWANGGA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Pada

**Program Studi Magsiter Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (TNWK) MENUJU DESA WISATA BERKELANJUTAN

Oleh

Fauzi Nur Dewangga

Luas tutupan hutan TNWK cenderung menurun setiap tahun karena aktifitas manusia yang melanggar peraturan konservasi kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja masyarakat dan menentukan strategi pembangunan desa penyangga TNWK di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif. Pengambilan data pada Bulan November sampai Desember 2020. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan perencanaan kolaboratif yang melibatkan peran akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Strategi pembangunan desa penyangga TNWK dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tergabung dalam lembaga sosial (budaya), ekonomi, dan lingkungan berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi mendukung pembangunan desa penyangga TNWK menjadi desa wisata. Strategi prioritas pembangunan desa penyangga TNWK yaitu mengoptimalkan peran lembaga desa dengan memanfaatkan *stakeholders* dalam memberikan pengetahuan untuk mengeksplorasi potensi desa kepada masyarakat, memanfaatkan kreatifitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam hutan agar menarik wisatawan minat khusus, dan meningkatkan kerja sama antar kepala desa dan kepala dusun dalam pembangunan desa wisata.

Kata kunci: desa penyangga, strategi pembangunan, TNWK

ABSTRACT

STRATEGY OF DEVELOPING A BUFFER VILLAGE WAY KAMBAS NATIONAL PARK (TNWK) TOWARDS A SUSTAINABLE TOURISM VILLAGE

By

Fauzi Nur Dewangga

The forest cover area of TNWK tends to decrease every year due to human activities that violate area conservation regulations. This study aims to identify the performance of the community and determine the development strategy of the TNWK buffer village in East Lampung Regency. This study uses an exploratory method. Data collection from November to December 2020. The analytical method used is descriptive qualitative and quantitative analysis with a collaborative planning approach involving the roles of academics, business actors, communities, government, and media. The TNWK buffer village development strategy is carried out using SWOT and AHP analysis tools. The results of the study show that the community who are members of social (cultural), economic, and environmental institutions play an active role in managing economic resources to support the development of the TNWK buffer village into a tourist village. The priority strategy for developing TNWK buffer villages is to optimize the role of village institutions by utilizing stakeholders in providing knowledge to explore village potential to the community, utilizing community creativity in managing forest natural resources to attract special interest tourists, and increasing cooperation between village heads and hamlet heads in tourism village development.

Key words: buffer village, development strategy, TNWK

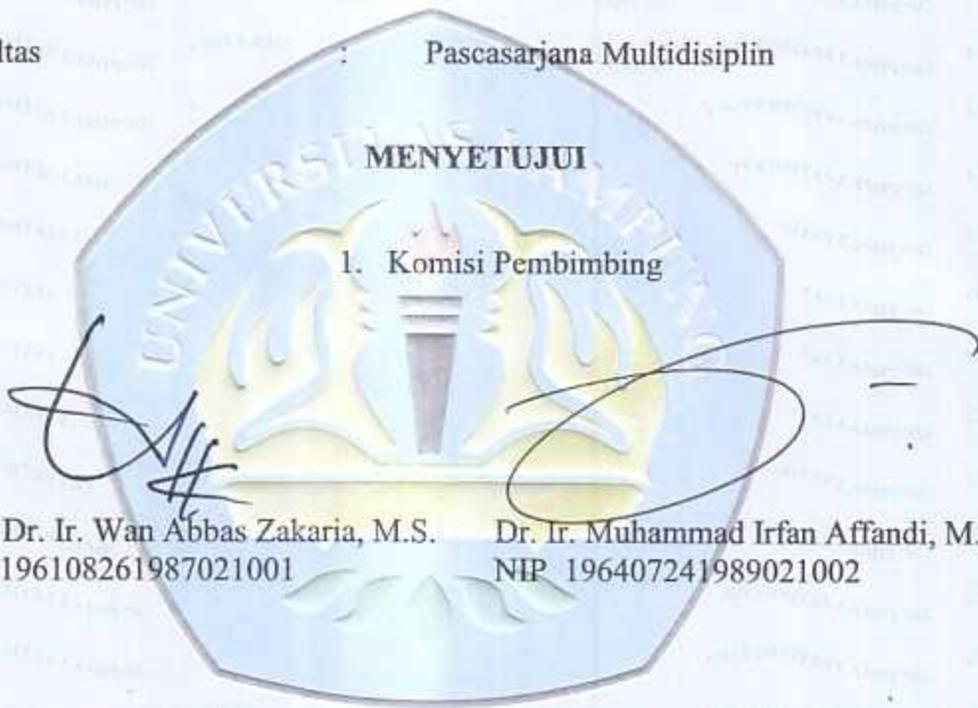
Judul Tesis : **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
PENYANGGA TAMAN NASIONAL
WAY KAMBAS (TNWK) MENUJU
DESA WISATA BERKELANJUTAN**

Nama Mahasiswa : **Fauzi Nur Dewangga**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1820051005

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 196108261987021001

Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP 196407241989021002

**2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan
Wilayah dan Kota**

Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP 196407241989021002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

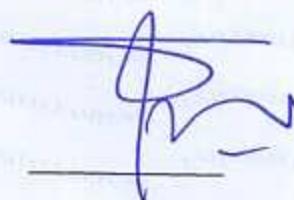
Ketua : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.



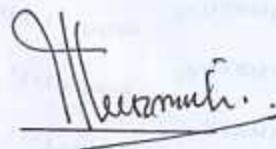
Sekretaris : Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.



Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.



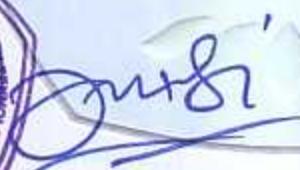
Anggota : Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 15 Oktober 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: “ STRATEGI PEMBANGUNAN DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (TNWK) MENUJU DESA DESA WISATA BERKELANJUTAN ” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



502AJX544022110
Fauzi Nur Dewangga
NPM 1820051005

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 1994, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Parwanto, S.E. dan Ibu Sri Sunarni. Tempat menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Fuad Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) Taman Siswa Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Bandar Lampung pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata satu (S1) di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Strata dua (S2) di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung. Penulis sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung aktif sebagai Ketua Umum GenBI Provinsi Lampung periode 2017/2019 yaitu Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia, Ketua Umum Himpunan Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung periode 2019/2020, dan menjadi Enumerator Penelitian Dosen Universitas Lampung.

Kepada Allah SWT

*Innallaaha Laa Yuḡhayyiru Maa Biqaumin Hatta
Yuḡhayyiruu Maa Bi Anfusihim*

“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri“

(QS. Ar-Ra’d: 11)

Kepada Mamah dan Bapak Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih tiada terhingga kupersembahkan karya tulis ini kepada mamah dan bapak yang telah memberikan cinta, kasih, dan ketulusan atas segala dukungan.

Kepada Adik-adik Tersayang

Sebagai tanda terima kasih atas keceriaan, perjuangan dan dukungan, semoga dapat menjadi insan yang berilmu

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini berjudul **“Strategi Pembangunan Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Menuju Desa Wisata Berkelanjutan”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung periode 2019/2021, sekaligus pembimbing utama atas waktu, saran, nasihat, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyelesaian tesis;
3. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, sekaligus pembimbing kedua atas arahan, bimbingan, ketulusan hati, kesabaran, nasihat, motivasi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis;
4. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc., selaku penguji utama, sekaligus pembimbing akademik dalam memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada penulis untuk proses penyempurnaan tesis;
5. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A., selaku penguji kedua atas saran dan masukan untuk proses penyempurnaan tesis;
6. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas ilmu dan bantuan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian akademik;

7. Teristimewa Mamah Sri Sunarni, Bapak Parwanto, Farhan Ihza Mahendra, Syailendra Al-Laduni dan Deratarini Ramadita yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, dan dukungan, bantuan, motivasi serta segala kebaikan dan kasih sayang yang tak pernah terputus hingga penulis mendapatkan gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota seperti yang diharapkan;
8. Responden penelitian dari Lembaga Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappeda, Balai TNWK, Redaksi Ini Lampung, Pemerintah Desa (Rantau Jaya Udik II, Labuhan Ratu VI, Braja Harjosari), Konsorsium Unila ALeRT, WCS Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) atas kesediaan memberikan bantuan data dan informasi;
9. Sahabat perkuliahan Mas Eko, Bang Zulman, Bang Andy, Dila, Pindo, Cipta, Muher, Milna yang selalu memberikan semangat dalam kebersamaan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala kekurangan yang ada, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala jasa yang telah diberikan. *Aamiin ya Robbal'alaamiin*

Bandar Lampung, Oktober 2021.

Penulis,

Fauzi Nur Dewangga

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Teori Pembangunan Wilayah Perdesaan	8
2. Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.....	10
3. Taman Nasional Way Kambas (TNWK).....	16
4. Teori Desa Penyangga dan Desa Wisata	20
5. Strategi Pembangunan Desa	22
a. Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) ..	23
b. Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM)	24
c. Analisis Hirarki Proses (AHP)	25
B. Kerangka Pemikiran	34
III. METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	38
B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional	38
C. Lokasi penelitian, Responden dan Waktu Penelitian	40
D. Metode Analisis Data	42
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian Desa Penyangga TNWK	52
1. Keadaan Geografis	52
2. Keadaan Iklim	53
3. Keadaan Demografis.....	53
4. Potensi Wilayah.....	54
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Karakteristik Umum Responden.....	60
B. Karakteristik Sosial (Budaya), Ekonomi, Lingkungan, dan Kelembagaan Desa Penyangga TNWK Menuju Desa Wisata Berkelanjutan	61

C.	Faktor Kekuatan (<i>Strength</i>), Kelemahan (<i>Weaknesses</i>), Peluang (<i>Opportunities</i>), dan Ancaman (<i>Threats</i>) Desa Penyangga TNWK Menuju Desa Wisata Berkelanjutan	70
D.	Strategi Pembangunan Desa Penyangga TNWK Menuju Desa Wisata Berkelanjutan	78
E.	<i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	91
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Status desa penyangga TNWK Kabupaten Lampung Timur	4
2. Skala penilaian perbandingan berpasangan.....	26
3. Penelitian terdahulu dengan metode penelitian serupa.....	29
4. Profil responden penelitian.....	41
5. Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kekuatan (<i>Strengths</i>).....	44
6. Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	44
7. Kerangka matrik faktor strategi eksternal untuk peluang (<i>Opportunities</i>).....	46
8. Kerangka matrik faktor strategi eksternal untuk ancaman (<i>Threats</i>)	46
9. Matriks <i>Quantitative Strategic Planning Matrix</i> (QSPM)	50
10. Jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah dan tingkat pendidikan di tiap desa 2019/2020.....	54
11. Jumlah desa yang memiliki sarana kesehatan 2019/2020	55
12. Jumlah tempat peribadatan di tiap desa 2019/2020	56
13. Luas lahan dan jenis penggunaan lahan di tiap desa, 2019	56
14. Populasi ternak dan jenis ternak di tiap desa, 2019	57
15. Jumlah industri pengolahan di tiap desa, 2019	57
16. Jumlah fasilitas perdagangan di tiap desa.....	58
17. Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di tiap desa	58
18. Jumlah sarana penunjang ekonomi di tiap desa	59
19. Kondisi jalan darat antar desa/kelurahan dan jarak dari kantor desa ke kecamatan, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi	59
20. Karakteristik umum responden	60
21. Karakteristik sosial (budaya) desa penyangga TNWK.....	62
22. Karakteristik ekonomi desa penyangga TNWK	64

23. Daftar harga terkait paket wisata Desa Braja Harjosari	65
24. Karakteristik lingkungan desa penyangga TNWK	67
25. Karakteristik kelembagaan desa penyangga TNWK	69
26. Matriks IFE Desa Rantau Jaya Udik II	71
27. Matriks IFE Desa Labuhan Ratu VI	72
28. Matriks IFE Desa Braja Harjosari	74
29. Matriks EFE Desa Rantau Jaya Udik II	75
30. Matriks EFE Desa Labuhan Ratu VI	76
31. Matriks EFE Desa Braja Harjosari	78
32. Pembobotan untuk diagram SWOT faktor internal dan eksternal Desa Penyangga TNWK	79
33. Total skor pada alternatif strategi Desa Rantau Jaya Udik II	87
34. Total skor pada alternatif strategi Desa Labuhan Ratu VI	88
35. Total skor pada alternatif strategi Desa Braja Harjosaris	88
36. Empat strategi prioritas utama Desa Rantau Jaya Udik II di Kabupaten Lampung Timur	89
37. Empat strategi prioritas utama Desa Labuhan Ratu VI di Kabupaten Lampung Timur	90
38. Empat strategi prioritas utama Desa Braja Harjosari di Kabupaten Lampung Timur	90
39. Hasil evaluasi bobot faktor strategi internal Desa Rantau Jaya Udik II	113
40. Hasil evaluasi bobot faktor strategi eksternal Desa Rantau Jaya Udik II	117
41. Kerangka matriks IFE dan EFE Desa Rantau Jaya Udik II	121
42. <i>Attractiveness Score</i> alternatif strategi pembangunan Desa Rantau Jaya Udik II	122
43. Hasil evaluasi bobot faktor strategi internal Desa Labuhan Ratu VI	123
44. Hasil evaluasi bobot faktor strategi eksternal Desa Labuhan Ratu VI	127
45. Kerangka matriks IFE dan EFE Desa Labuhan Ratu VI	131
46. <i>Attractiveness Score</i> alternatif strategi pembangunan Desa Labuhan Ratu VI	132
47. Hasil evaluasi bobot faktor strategi internal Desa Braja Harjosari	133
48. Hasil evaluasi bobot faktor strategi eksternal Desa Braja Harjosari	137

49. Kerangka matriks IFE dan EFE Desa Braja Harjosari	140
50 <i>Attractiveness Score</i> alternatif strategi pembangunan Desa Braja Harjosari	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Luas tutupan hutan kawasan TNWK.	2
2. Jenis pelanggaran pada kawasan TNWK.	3
3. Kerangka pemikiran pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan.	36
4. Kerangka AHP penentuan program prioritas pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan.	37
5. Matriks IE.	47
6. Matriks SWOT.	48
7. Matriks I-E Desa Penyangga TNWK	80
8. Matriks Desa Rantau Jaya Udik II Kabupaten Lampung Timur.	82
9. Matriks Desa Labuhan Ratu VI Kabupaten Lampung Timur.	83
10. Matriks Desa Braja Harjosari Kabupaten Lampung Timur.	84
11. Hasil analisis perbandingan berpasangan antara kriteria terhadap tujuan pembangunan Desa Rantau Jaya Udik II.	93
12. Hasil analisis perbandingan berpasangan antara kriteria terhadap tujuan pembangunan Desa Labuhan Ratu VI.	95
13. Hasil analisis perbandingan berpasangan antara kriteria terhadap tujuan pembangunan Desa Braja Harjosari.	96
14. Hasil analisis perbandingan berpasangan antara alternatif strategi pembangunan Desa Rantau Jaya Udik II.	98
15. Hasil analisis perbandingan berpasangan antara alternatif strategi pembangunan Desa Labuhan Ratu VI.	100
16. Hasil analisis perbandingan berpasangan antara alternatif terhadap tujuan pembangunan Desa Braja Harjosari.	101

22. Persentase bobot nilai antar tiap kriteria dan alternatif strategi pembangunan Desa Rantau Jaya Udik II terhadap pencapaian program prioritas pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan . 143
23. Persentase bobot nilai antar tiap kriteria dan alternatif strategi pembangunan Desa Labuhan Ratu VI terhadap pencapaian program prioritas pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan 144
24. Persentase bobot nilai antar tiap kriteria dan alternatif strategi pembangunan Desa Braja Harjosari terhadap pencapaian program prioritas pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan 145
20. Wawancara penelitian secara *virtual zoom meeting* dan *on the spot*..... 146
21. Produk lokal desa penyangga TNWK 146

I. PENDAHULUAN

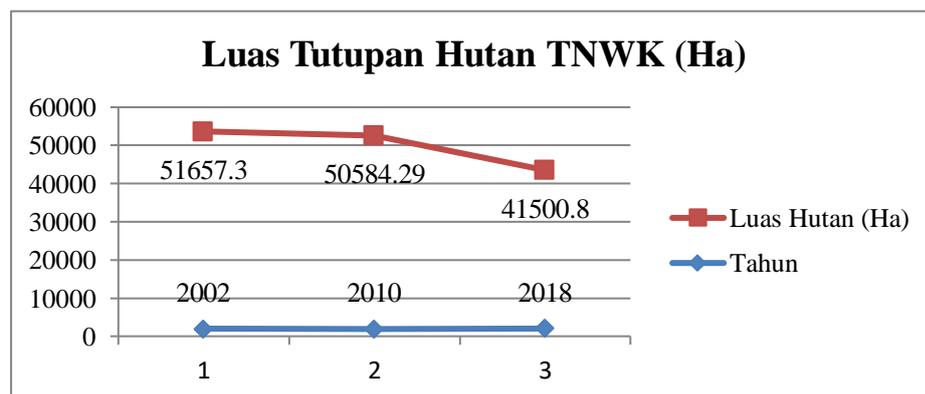
A. Latar Belakang

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan bagian dari kawasan konservasi kesatuan ekosistem hutan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, 2016). Kawasan konservasi TNWK tidak terkoneksi dengan kawasan hutan lainnya. Kawasan ini berbatasan langsung dengan pemukiman dan laut sehingga memberikan tantangan besar mempertahankan luasan hutan, karena dapat menjadi akses untuk masuk ke dalam kawasan TNWK seiring perubahan geopolitik, sosial, ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk dan dinamika pembangunan yang terjadi. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak berupa tekanan ke kawasan konservasi yang kompleks.

Posisi kawasan TNWK dalam tata ruang tercantum pada Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Nomor 13 Tahun 2012 dan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) Pasal 123 ayat (4) Nomor 26 Tahun 2008. Isi dalam rencana tata ruang tersebut menunjukkan bahwa TNWK adalah kawasan pelestarian hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi dan diperuntukan sebagai kawasan ekowisata (Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, 2020). Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung (2009–2029) menempatkan TNWK sebagai pariwisata unggulan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Lampung khususnya masyarakat desa penyangga.

Hasil penelitian Azizah dan Fitra (2017) menunjukkan masyarakat desa penyangga belum berperan mengoptimalkan potensi sumber daya alam desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan TNWK. Masyarakat sebagian kecil masih memiliki ketergantungan ekonomi pada kawasan TNWK terutama hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dikarenakan tingkat pendapatan rumah tangga desa penyangga yang masih relatif rendah yaitu rata-rata Rp1.338.848,00 sampai Rp1.602.437,00/bulan/rumah tangga, jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 Rp2.432.150,00/bulan (Veriasa dan Indraswati, 2021). Beberapa penelitian menyatakan sebesar 90% penduduk miskin di perdesaan bergantung dengan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Bakkegaard *et al.*, 2017).

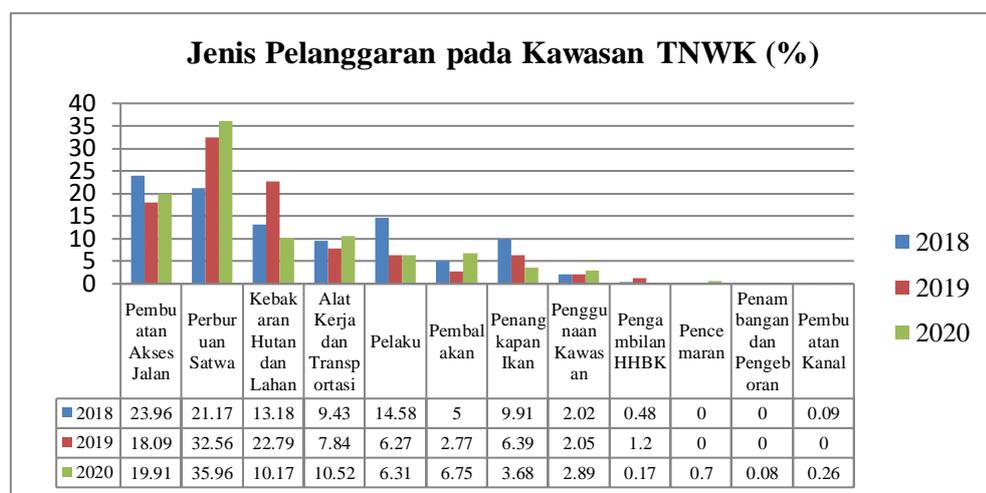
Data luas tutupan hutan oleh Pramana (2019) menunjukkan lahan hutan TNWK mengalami penurunan di setiap tahunnya. Tahun 2002 lahan hutan TNWK seluas 51.657,30 Ha, pada tahun 2010 mengalami penurunan luas hutan menjadi seluas 50.584,29 Ha, dan di tahun 2018 lahan hutan TNWK menjadi seluas 41.500,80 Ha. Data luas lahan hutan kawasan TNWK dapat terlihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Luas tutupan hutan kawasan TNWK.

Sumber: Pramana (2019)

Publikasi dari dokumen Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK tahun 2018 menyatakan bahwa luas tutupan hutan kawasan TNWK cenderung menurun, diindikasikan oleh peningkatan luas padang alang-alang yang disebabkan berulangnya kejadian kebakaran hutan dan perambahan karena aktivitas yang disengaja oleh manusia (Ditjen KSAE, 2108). Berdasarkan data dari Balai TNWK menunjukkan beberapa temuan pelanggaran dari unsur kesengajaan manusia yang masuk ke dalam kawasan pada tiap tahunnya. Temuan pelanggaran dikategorikan ke beberapa jenis pelanggaran diantaranya pembuatan akses jalan, perburuan satwa, kebakaran hutan dan lahan, alat kerja dan transportasi, pelaku, pembalakan, penangkapan ikan, aktivitas manusia, penggunaan kawasan, pengambilan HHBK, pencemaran, penambangan dan pengeboran, dan pembuatan kanal yang dapat terlihat pada Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2. Jenis pelanggaran pada kawasan TNWK.

Sumber: Balai TNWK (2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa jenis pelanggaran perburuan satwa mengalami peningkatan disetiap tahunnya, yang mengindikasikan kebakaran hutan sering terjadi. Pembakaran lahan hutan dilakukan untuk meningkatkan hasil perburuan dan dapat menumbuhkan rumput, karena rumput yang tumbuh akan menarik satwa liar untuk datang. Praktik ini masih terus digunakan oleh pemburu karena

dianggap cukup berhasil dan efektif (Oelrichs *et al.*, 2016). Dinamika ini akan menimbulkan ancaman bagi keseimbangan kawasan konservasi dan desa penyangga sekitarnya apabila tidak ditanggapi lebih lanjut oleh pemangku kepentingan.

Desa penyangga yang berbatasan dengan kawasan TNWK mencapai 38 desa yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Desa Penyangga TNWK yang berada di Kabupaten Lampung Timur dan status perkembangan desa-desa penyangga dapat terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Status desa penyangga TNWK Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Desa	IDM 2019	Status
1	Labuhan Maringgai	Margasari	0,6316	Berkembang
2	Labuhan Maringgai	Sukorahayu	0,5807	Tertinggal
3	Labuhan Maringgai	Karang Anyar	0,6760	Berkembang
4	Way Jepara	Braja Asri	0,5832	Tertinggal
5	Braja Selehah	Braja Luhur	0,5913	Tertinggal
6	Braja Selehah	Braja Kencana	0,6018	Berkembang
7	Braja Selehah	Braja Harjosari	0,7062	Maju
8	Braja Selehah	Braja Yekti	0,6667	Berkembang
9	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu VII	0,6073	Berkembang
10	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu VI	0,6390	Berkembang
11	Labuhan Ratu	Raja Basa Lama Satu	0,5460	Tertinggal
12	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu IX	0,5933	Tertinggal
13	Sukadana	Sukadana	0,6199	Berkembang
14	Sukadana	Rantau Jaya Udik II	0,5341	Tertinggal
15	Sukadana	Muara Jaya	0,6648	Berkembang
16	Purbolinggo	Tambah Dadi	0,6888	Berkembang
17	Purbolinggo	Taman Endah	0,6611	Berkembang
18	Purbolinggo	Taman Fajar	0,6792	Berkembang
19	Purbolinggo	Tegal Yoso	0,6252	Berkembang
20	Purbolinggo	Tanjung Kesuma	0,6784	Berkembang
21	Way Bungur	Tegal Ombo	0,6867	Berkembang
22	Way Bungur	Toto Projo	0,6646	Berkembang
23	Way Bungur	Tanjung Tirto	0,6611	Berkembang
24	Way Bungur	Kali Pasir	0,6443	Berkembang

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (2019)

Lokasi penelitian difokuskan di Desa Rantau Jaya Udik II, Desa Labuhan Ratu VI, dan Desa Braja Harjosari karena merupakan mitra khusus Balai TNWK yang mewakili dari desa penyangga TNWK yang tertinggal, berkembang, dan maju berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Pembangunan desa penyangga TNWK penting diperhatikan karena terkait dengan keberlanjutan pengelolaan TNWK dan desa penyangga sekitarnya. Kondisi yang terjadi saat ini bahwa perencanaan Balai TNWK dalam pencapaian misinya yaitu *“Mendayagunakan Secara Optimal Potensi Ekonomi Kawasan TNWK Pada Zona Pemanfaatan Dan Zona Lainnya Di Luar Zona Inti Untuk Memberikan Manfaat Bagi Peningkatan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Terutama Di Sekitar Kawasan”* yang tertuang dalam beberapa program, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pembangunan desa penyangga ke arah yang lebih baik perlu dilakukan selain mengejar pencapaian ekonomi, disisi lain meningkatkan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, administrasi pemerintahan, peningkatan keterampilan kerja, dan perlindungan sumber daya alam dalam mengelola kawasan konservasi. Paradigma baru pembangunan perdesaan dalam menggerakkan sistem industri berbasis sektor jasa perlu dikembangkan yaitu dengan menggerakkan pembangunan desa wisata yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat desa terhadap hasil hutan kawasan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2017) menjelaskan pembangunan momentum baru perdesaan di Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia secara terarah dengan melibatkan masyarakat desa dalam mengembangkan kawasan perdesaan. Perencanaan kolaboratif diperlukan dalam menyusun rencana strategis dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang sedang dihadapi (Persada, 2018).

Perencanaan kolaboratif yang terstruktur dapat mengidentifikasi isu sosial (budaya), ekonomi, lingkungan dan kelembagaan dari permasalahan pembangunan desa penyangga TNWK yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan program-program pembangunan pariwisata menuju aspek-aspek pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga desa penyangga yang berkembang maju dan mengalami pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak terhadap tingkat ketergantungan pada kawasan TNWK berkurang signifikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja desa penyangga TNWK ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial (budaya) dan kelembagaan?
2. Apa saja faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan?
3. Bagaimana strategi pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kinerja desa penyangga TNWK yang ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial (budaya) dan kelembagaan
2. Menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan
3. Menentukan strategi pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bagi pemangku kebijakan, sebagai rekomendasi menentukan arah pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan
2. Bagi pihak swasta, sebagai pertimbangan memberikan investasi pembangunan pariwisata sesuai etika bisnis, professional, bertanggung jawab dan berkelanjutan
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi melakukan penelitian selanjutnya

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembangunan Wilayah Perdesaan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan wilayah perdesaan telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wilayah perdesaan yang dalam undang-undang tersebut disebut Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Definisi tersebut ketinggalan zaman karena masih terdapat kata didominasi oleh sektor pertanian, karena di beberapa negara maju dan negara berkembang yang sedang menuju negara maju, sektor pertanian tidak lagi menjadi dominan. Sektor industri berbasis pertanian atau industri lainnya, ataupun sektor jasa seperti pariwisata bahkan mendominasi wilayah perdesaan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah (Ismail dan Syafitri, 2005). Di beberapa wilayah perdesaan di Indonesia, seperti di Banyuwangi, Wakatobi, Raja Ampat, dan Bali sektor perekonomian yang mendominasi yaitu sektor wisata (Budiharsono, 2018).

Pembangunan wilayah perdesaan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang disebut Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Pembangunan kawasan perdesaan menurut undang-undang tersebut meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pembangunan teknologi tepat guna; dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi

Jamal (2009) dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pembangunan perdesaan di Indonesia kurang dilandasi upaya sistematis untuk mengembangkan kapasitas penduduk sebagai individu dan bagian dari suatu komunitas. Kondisi kehidupan masyarakat perdesaan yang makin heterogen dan kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan perdesaan yang makin terbatas, maka untuk mempercepat pembangunan perdesaan dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak utamanya, salah satunya dengan mengupayakan membangun momentum baru bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali sebagai wujud mengembangkan momentum baru pembangunan perdesaan di Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia perdesaan secara terarah dengan melibatkan masyarakat desa dalam mengembangkan kawasan perdesaan (Zakaria, 2017).

Partisipasi masyarakat menjadikan perencanaan pembangunan perdesaan lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana atau program pembangunan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan

pelaksanaan program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien (Ardilah, Makmur dan Hanafi, 2015). Hasil penelitian Mustanir (2017) di Tonrong Rijang, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tanpa adanya peran masyarakat desa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan perdesaan akan menghasilkan program yang tumpang tindih akibat dari identifikasi masalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dilakukan berulang kali setiap kali program baru akan dibentuk. Usulan rencana pembangunan perdesaan yang telah disampaikan sebelumnya biasanya akan disampaikan lagi dalam pertemuan karena program yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi agar pembangunan wilayah perdesaan dapat berkembang dengan baik. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penciptaan dan pemeliharaan lingkungan yang memungkinkan semua pelaku ekonomi, investor, pekerja, pendidik, lembaga keuangan, serta penyedia layanan dapat membuat keputusan yang baik dan bekerja sama untuk menghasilkan pembangunan ekonomi wilayah yang optimal. Pemerintah daerah dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan wilayah perdesaan, bertindak di beberapa bidang, yaitu sosial, kelembagaan, lingkungan, dan ekonomi.

2. Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata adalah sektor jasa yang akan menjadi kegiatan ekonomi penting dunia abad 21. Pariwisata merupakan sektor penunjang pembangunan nasional yang berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti devisa negara, menumbuhkan banyak peluang ekonomi skala kecil dan menengah, pencipta lapangan kerja, sebagai katalis untuk pembangunan sektor-sektor ekonomi lain seperti perikanan, pertanian kehutanan dan *manufacturing*, serta dapat meningkatkan upaya menjaga dan memperbaiki lingkungan. Cooper *et al* (1993) menyatakan bahwa pariwisata perlu memiliki 4 (empat) komponen utama yang

saling terkait dan harus dimiliki yang dikenal dengan 4 A yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan *ancillary service* (Persada, 2018):

- 1) Atraksi, seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni pertunjukan.
- 2) Aksesibilitas seperti transportasi lokal dan adanya terminal.
- 3) Amenitas atau fasilitas seperti tersedianya akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan.
- 4) *Ancillary service* yaitu organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisata seperti *destination marketing, management organization, conventional and visitor bureau*.

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai karakteristik multi-dimensional atau berdimensi banyak yang diharapkan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan merata, khususnya perekonomian masyarakat lokal. Terdapat 8 (delapan) keuntungan pembangunan pariwisata menurut Dorodjatun (2008) dalam Persada (2018) yaitu:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha
- 2) Peningkatan kesempatan kerja
- 3) Peningkatan penerimaan pajak
- 4) Peningkatan pendapatan nasional
- 5) Percepatan proses pemerataan pendapatan
- 6) Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan
- 7) Memperluas pasar produk dalam negeri, dan
- 8) Memberi dampak *multiplier effect* dalam perekonomian

Pariwisata sebagai sektor jasa yang memiliki karakteristik multi-dimensional hendaknya dalam menggerakkan pembangunan pariwisata dilandasi dengan perencanaan pariwisata yang melibatkan sinergi antar *stakeholders* (pemangku kepentingan) terutama industri, pemerintah, dan masyarakat. Sutriadi (2018) dalam Persada (2018) menjelaskan bahwa perencanaan pariwisata perlu dilakukan secara sistemik dan selaras dengan perencanaan wilayah dan kota, karena keinginan untuk berwisata akan meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan seluruh aktivitas wisata yang dilakukan berkaitan dengan pemanfaatan ruang

dan waktu. Pembangunan pariwisata secara berkelanjutan perlu dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah kependudukan mencapai perbaikan pelayanan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Prinsip pariwisata berkelanjutan dapat terlaksana jika memiliki tiga karakter utama (3T) yaitu terarah, terintegrasi, dan terlibat yang dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi, sinergi dan partisipasi seluruh *stakeholders*. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu pada pencapaian tujuan:

- 1) Nomor 8, mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan pekerjaan yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua *“Pada 2030 merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk lokal dan mendukung budaya serta produk lokal”*
- 2) Nomor 12, memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan *“Mengembangkan dan mengimplementasikan sarana untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung budaya dan produk lokal”*
- 3) Nomor 14, konservasi dan pemakaian sumber samudera, laut, dan yang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan *“Pada 2030 meningkatkan manfaat ekonomi dari SIDS dan LCDs dengan pemakaian sumber laut yang berkelanjutan, termasuk dengan pengelolaan perikanan akuakultur, dan pariwisata yang berkelanjutan”*

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting yakni ekonomi, sosial (budaya), dan lingkungan. Dimensi ekonomi berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi memerangi kemiskinan, serta mengubah pola produksi dan konsumsi yang seimbang. Dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Dimensi

lingkungan mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumberdaya alam.

Ketiga dimensi utama (sosial (budaya), ekonomi dan lingkungan dijelaskan oleh Alisjahbana dan Murniningtyas (2018) mempunyai konsep pembangunan berkelanjutan yang diperluas, yaitu dengan menambahkan satu dimensi kelembagaan. Dimensi kelembagaan diperlukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola politik. Mekanisme pengambilan keputusan harus mengintegrasikan keinginan rakyat dan kegiatan. Dimensi kelembagaan meliputi bukan hanya organisasi, melainkan juga mekanisme dan orientasi.

Perencanaan pariwisata sebagai perencanaan yang multi sektor dan multi aspek serta multi wilayah, maka dibutuhkan perencanaan kolaboratif sebagai proses menuju perencanaan yang terintegratif baik secara hirarki (Provinsi, Kabupaten, Kota) maupun secara sektor (berbagai kelembagaan/kementrian). Perencanaan kolaboratif adalah proses pembuatan keputusan dimana berbagai pemangku kepentingan, yang melihat permasalahan dari berbagai sudut, duduk bersama untuk menggali perbedaan mereka secara konstruktif, kemudian mencari solusi, dan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi sendiri-sendiri (Budiharsono, 2018). Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan berbasis komunikasi (rasionalitas komunikatif).

Perencanaan kolaboratif akan berhasil jika ada ketergantungan antar pelaku, seperti digambarkan oleh Innes dan Booher (2010) dalam model *DIAD Network Dynamic* untuk memperlihatkan bahwa proses kolaborasi menggambarkan jejaring kolaboratif dimana terdapat keragaman, saling ketergantungan dan dialog otentik didalamnya. Saling ketergantungan akan menimbulkan keinginan untuk berkompromi, yang akhirnya mencapai konsensus. Terbetuknya konsensus merupakan suatu hasil dari proses yang bersifat demokratik, partisipasi yang terstruktur, serta membutuhkan waktu dan kesabaran. Unsur utama dalam perencanaan kolaboratif yaitu proses kolaboratif.

Tahapan proses kolaboratif sebagai berikut:

- 1) Pengaturan masalah mencakup (definisi masalah yang umum, komitmen untuk berkolaborasi, identifikasi pemangku kepentingan, legitimasi pemangku kepentingan baik dari segi penerimaan internal maupun eksternal. Karakteristik *convenor* serta identifikasi dan ketersediaan sumber daya untuk partisipasi dan kolaborasi)
- 2) Pengaturan arah mencakup (penetapan peraturan dasar, pengaturan agenda, mengatur subkelompok, misalnya gugus tugas, pencarian informasi Bersama, pilihan penjelajahan, mencapai kesepakatan dan menutup kesepakatan).
- 3) Implementasi mencakup (berhubungan dengan konstituen, membangun dukungan eksternal, penataan, memantau kesepakatan dan memastikan kepatuhan).

Proses kolaboratif memerlukan partisipasi tinggi, kesetaraan kekuasaan, dan para aktor yang kompeten. Kondisi ideal terlihat sulit terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi rendah, ketidaksetaraan kekuasaan, dan kompetensi yang rendah, walaupun bisa terlaksana maka peran pimpinan sangatlah penting (Sufianti, 2014). Kolaborasi akan memberikan hasil positif, pilihan pencapaian solusi untuk kepentingan mereka, perlu pencapaian kesepakatan yang fair diantara *stakeholders*, tiap *stakeholders* punya kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, para *stakeholders*. Perencanaan kolaboratif agar dapat terwujud perlu diperhatikan:

- 1) Semua pihak yang terlibat bersedia membuka diri, sehingga muncul saling percaya di antara berbagai pihak yang akan berkolaborasi. Semua pihak harus terbuka, jujur, saling menghormati dan menghargai, sehingga tidak muncul konflik,
- 2) Pendekatannya perlu bersinergi, bukan berarti tidak ada kompetisi, kompetisi boleh ada tapi harus dijaga sebagai usaha untuk daya dorong mencapai tujuan bersama, dan
- 3) Setiap pihak memposisikan dirinya sama atau ada kesederajatan jadi tidak ada yang tinggi atau rendah, tetapi berbeda dalam peran, misalnya: pemerintah sebagai mediator, fasilitator dan legislator, sedangkan swasta sebagai praktisi dan investor.

Terdapat lima kelompok kunci yang dapat berkolaborasi menurut Cooper *et al* (1993) yaitu Akademisi, *Businessman*, *Community*, *Government* dan Media atau dikenal dengan Lima Pilar (ABCGM). Berikut peran masing-masing *stakeholders*:

- 1) Akademisi berperan melakukan berbagai riset dan pengabdian masyarakat berkaitan pembangunan pariwisata, agar pembangunan pariwisata berbasis penelitian
- 2) *Business* (swasta/dunia usaha) berperan sebagai penyelenggara bisnis sesuai etika bisnis, profesional, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran dunia usaha sebagai Lembaga yang *profit oriented* juga harus ikut bertanggung jawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai modal utama pariwisata. Beberapa destinasi pariwisata yang berhasil melibatkan banyak pihak, salah satu karena membangun pendekatan non formal antara swasta dan pemerintah
- 3) *Community* di dalamnya masyarakat dan komunitas-komunitas (NGO/LSM); masyarakat berperan mendukung sapta pesona/darwis plus dan menyediakan jasa pariwisata/ekonomi kreatif. Masyarakat adalah obyek dan subyek dari perencanaan itu sendiri, tapi di sisi lain masyarakat bisa menjadi kendala. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu persis apa peran mereka dan pariwisata adalah untuk kesejahteraan mereka juga.
- 4) *Government* berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pembangunan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan destinasi adalah sebagai regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana.
- 5) Media berperan sebagai kekuatan informasi andalan dalam promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran pariwisata sekarang sudah dapat dilakukan dengan cepat dengan memanfaatkan media sosial.

Perencanaan kolaboratif untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan sudah disiapkan pemerintah Indonesia yang sejalan dengan aspek-aspek pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

3. Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 144/KPTS/II/1991 tanggal 13 Maret 1991, secara resmi berdiri Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang dikelola oleh Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam yang bertanggung jawab langsung kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam II Tanjung Karang. Pada tahun 1997, Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Way Kambas ditingkatkan lagi statusnya menjadi Balai TNWK dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/KPTS-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 dengan luas 125.621,3 Ha. Status TNWK dikuatkan lagi dengan SK Nomor 670/Kpts-II/1999 tentang penetapan kawasan TNWK tanggal 26 Agustus 1999 dengan luasan 125.621,3 Ha. Secara administrasi pemerintahan berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Seputih Surabaya) (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, 2016).

Secara administrasi kehutanan kawasan tersebut berada di wilayah kerja Balai Taman Nasional Way Kambas. Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, mempunyai fungsi utama untuk dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. TNWK dengan kekayaan hayati dan nonhayati yang dimilikinya merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi obyek daya tarik bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Beberapa lokasi telah menjadi ikon wisata yang telah dikenal dengan baik provinsi maupun nasional, seperti Pusat Latihan Gajah (PLG)/Pusat Konservasi Gajah (PKG) dengan asset utama gajah jinak, Suaka Rhino Sumatera (SRS) dengan asset badak Sumatera sebagai satu-satunya lokasi penangkaran badak Sumatera secara semi alami. Potensi burung di TNWK sudah diakui oleh para penggemar burung dunia. Kawasan ini juga menjadi salah satu lokasi pengamatan burung alam terbaik di Asia. Lokasi yang layak dikembangkan untuk pengamatan burung seperti jalur Plang Hijau-Way Kanan, Sepanjang jalan lingkar SRS, Sepanjang aliran sungai Way Kanan sampai dengan Kuala Kambas.

TNWK memiliki peran yang besar dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung. TNWK menempati posisi penting sebagai obyek wisata unggulan di Provinsi Lampung. Berbagai potensi yang berada di TNWK tidak luput dari adanya permasalahan dan isu-isu strategis terkait Kawasan.

- a. Permasalahan kawasan TNWK yang menjadi persolan harus segera diselesaikan yakni :
 - 1) Pengelolaan kawasan berbasis resort atau *Resort Based Management* (RBM) belum berjalan dengan optimal, hal ini ditunjukkan oleh terbatasnya informasi potensi dan masalah di tingkat resort.
 - 2) Lahan kritis, berdasarkan kondisi penutupan lahan, kawasan TNWK dengan penutupan vegetasi alang-alang dan semak belukar cukup tinggi lebih kurang 40.000 ha (35%) dari luas total wilayah. Lahan tersebut tersebar mulai dari zona inti, rimba, dan pemanfaatan. Timbulnya lahan kritis di TNWK diawali dengan aktivitas pembalakan pada kisaran tahun 1968-1974. Proses suksesi baik buatan atau alami sering mengalami kegagalan karena terjadi kebakaran hutan berulang, aktivitas perambahan hutan.
 - 3) Kebakaran hutan di kawasan TNWK rutin terjadi, yang ditunjang dengan kondisi vegetasi dan perubahan cuaca. Faktor utama penyebab kebakaran adalah ulah manusia melalui kegiatan perambahan dan perburuan. Daerah yang rawan kebakaran hutan mencapai 40.000 ha sesuai dengan penutupan lahannya. Kawasan yang dahulu didominasi oleh tumbuhan berkayu telah berubah menjadi semak belukar yang lebih mudah terbakar.
 - 4) Perburuan liar, TNWK memiliki keanekaragaman jenis satwa dengan populasi yang cukup tinggi. Babi hutan, rusa sambar, kijang, dan napu merupakan satwa yang sering dibunuh. Selain itu, satwa langka yang dilindungi juga menjadi sasaran pemburuan seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Aktivitas ilegal lain yaitu pencurian burung dan pengambilan ikan air tawar dalam kawasan.
 - 5) Konflik satwa, rusaknya habitat dan menurunnya kualitas ekosistem menjadi penyebab satwa keluar untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga sering menimbulkan konflik dengan masyarakat. Konflik satwa yang menonjol adalah gangguan gajah di lahan budidaya, khususnya yang berbatasan

langsung dengan kawasan hutan. Konflik tersebut, terjadi lebih dari 150 hari dalam setahun dengan jumlah rombongan 5-50 ekor. Pada saat musim hujan, masyarakat sekitar TNWK melakukan penanaman tanaman pertanian seperti Jagung dan Padi. Aroma bunga dari tanaman pertanian tersebut telah menarik minat Gajah untuk keluar kawasan dan mencari makanan alternatif, akibatnya timbul konflik Gajah dengan masyarakat. disisi lain, musim hujan memberikan stok makanan yang berlimpah dari dalam kawasan TNWK bagi Gajah, namun mereka tetap keluar kawasan.

- 6) Pencurian kayu, kondisi hutan TNWK relatif masih baik, jika dibandingkan dengan daerah di luar kawasan. Tingginya permintaan kayu oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan. Jenis yang sering dicuri yaitu pusoas, meranti, merawan, gelam, laban, dan sempu untuk bahan bangunan, serta nibung yang dipergunakan untuk membangun bagan nelayan. Pencurian kayu yang terjadi di TNWK termasuk dalam kategori skala kecil, termasuk pencurian kayu untuk kayu bakar. Lokasi yang sering terjadi aktivitas pencurian kayu, yaitu RPTN Cabang, RPTN Umbuk Salam (SPTN II Bungur), RPTN Kuala Penet (SPTN III Kuala Penet).
- 7) Penggembalaan liar, TNWK memiliki padang rumput yang cukup banyak, baik yang tumbuh di rawa-rawa ataupun lahan yang lebih kering di atasnya. Jenis ternak yang dilepas yaitu kerbau yang dilepaskan oleh pemiliknya mencapai 3500 ekor. Lokasi yang dijadikan areal penggembalaan liar di RPTN Bungur dan RPTN Kuala Penet. Adanya penggembalaan tersebut telah terjadi kompetisi antara kerbau dengan satwa yang ada didalamnya, khususnya gajah dan rusa. Demikian juga, kemungkinan menularnya penyakit ke satwa liar, yang dapat mematikan satwa liar. Berbagai upaya dilakukan seperti dialog dengan masyarakat pemilik kerbau, aparat desa, kecamatan dan dinas terkait, monitoring dan penjagaan oleh petugas. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, jumlah kerbau yang masih dalam kawasan hutan 280 ekor.

- b. Isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kawasan TNWK yakni :
- 1) Perlindungan terhadap kawasan meliputi flora, fauna, dan ekosistemnya belum terlaksana dengan baik
 - 2) Pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya secara in-situ untuk mencegah kepunahan jenis serta memelihara keseimbangan dan kemandirian ekosistem belum terlaksana dengan baik
 - 3) Penggalian potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan TNWK untuk pemanfaatan terkendali baik pada tingkat ekosistem, flora dan fauna belum optimal
 - 4) Fungsi kawasan TNWK secara ekonomi belum seluruhnya terwujud, sehingga belum member manfaat nyata bagi kepentingan kemandirian Balai TNWK dan mendukung kesejahteraan masyarakat
 - 5) Pengelolaan kawasan TNWK belum terpadu dan sinergis dengan kegiatan pembangunan wilayah baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta kepentingan berbagai pihak dalam dan luar negeri
 - 6) Kualitas dan kuantitas SDM pengelola kawasan hingga lingkup resort untuk mendukung implementasi RBM perlu ditingkatkan
 - 7) Perlindungan habitat satwa yang dilindungi perlu ditingkatkan karena pengelolaan saat ini terfokus pada pengelolaan satwa di Pusat Konservasi Gajah (PKG), sementara pengelolaan habitat alami Harimau Sumatera sebagai satwa yang menjadi dasar penetapan kawasan TNWK kurang diperhatikan
 - 8) Adanya pusat perkembangbiakan satwa Badak Sumatera (SRS) yang pertama di Indonesia maka posisi TNWK menjadi sangat strategis sebagai lokasi penelitian dan pembangunan teknologi dalam perkembangbiakan satwa Badak.
 - 9) Peran mitra kerja juga harus terakomodir, termasuk rencana kedepan terhadap kelangsungan kegiatan mitra kerja tersebut.

4. Teori Desa Penyangga dan Desa Wisata

Menurut UU No 06 Tahun 2014 definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan penyangga sendiri merupakan daerah yang mengelilingi kawasan lindung berfungsi menjaga Kawasan Suaka Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan kebutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998).

Kesimpulannya desa penyangga adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam sistem pemerintahan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan memiliki tanggung jawab menjaga Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam agar kawasan tersebut terjaga keutuhannya.

Pengelolaan atas desa penyangga mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan harus di dasarkan pada tiga aspek yang terkait yaitu aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat, sehingga desa penyangga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup dan persepsi masyarakat dalam menjaga keutuhan kawasan konservasi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, 2018). Partispasi aktif masyarakat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut dalam perencanaan pembangunan kawasan penyangga. Pembangunan kawasan penyangga merupakan pembangunan terpadu yang mencakup berbagai bidang berdasarkan karakteristik permasalahan dan kebutuhan obyektif dari masing – masing wilayah (Bismark, 2002). Keberadaan desa penyangga agar lebih tertata dalam manfaat dan fungsinya tergantung pada dukungan kelembagaan, peraturan daerah, koordinasi antar *stakeholders* (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2016).

Prabowo dkk (2016) mengemukakan bahwa desa wisata merupakan kawasan atau wilayah yang didalamnya terdapat banyak atraksi wisata (budaya, buatan, alam) yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik wisatawan berkunjung. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (2009) mendefinisikan desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan luasan tertentu yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang mampu menciptakan perpaduan daya tarik wisata dengan pembangunan fasilitas pendukung wisatanya dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima kunjungan wisatawan, termasuk didalamnya kampung wisata karena keberadaannya di daerah kota. Persyaratan yang harus ada dalam Desa Wisata menurut Persada (2018) yaitu mempunyai :

- 1) Aksesibilitas yang baik sehingga mudah dikunjungi wisatawan
- 2) Obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata,
- 3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan
- 4) Keamanan di desa tersebut terjamin,
- 5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai,
- 6) Beriklim sejuk atau dingin,
- 7) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal masyarakat luas

Pembangunan pariwisata berbasis desa diperlukan karena penduduk desa kurang dilibatkan dalam pembangunan pariwisata di destinasi pariwisata, tingginya perubahan kepemilikan lahan dari penduduk lokal ke pihak lain, sehingga perlu dilakukan *land marking*, konsolidasi lahan, dan tingginya alih guna dan fungsi lahan dari pertanian ke kawasan terbangun. Jenis desa wisata ditinjau dari aktivitas utama yang menjadi daya tarik wisata yaitu:

- 1) Desa Wisata Alam, merupakan desa dengan daya tarik utamanya alam yang indah dan biasanya desa wisata ala mini memilih tema-tema tertentu yang berkaitan dengan alam untuk memasarkan desanya.
- 2) Desa Wisata Budaya, merupakan wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan

(religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan saksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukkan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.

- 3) Desa Wisata Ekonomi Kreatif, merupakan kampung atau desa wisata yang menjadikan potensi ekonomi kreatif sebagai daya tarik utama desa.
- 4) Desa Wisata Agro, merupakan desa wisata yang menjadikan sektor pertanian dan perkebunan menjadi daya tarik utama.

5. Strategi Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriteria yakni mencakup:

- 1) Hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program,
- 2) Hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategis,
- 3) Pernyataan umum guna memandu pembangunan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan
- 4) Dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pembangunan program prioritas. Perumusan strategi dilakukan sebagai rencana panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Strategi pembangunan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang, dan bertahap. Strategi pembangunan dapat bersifat menyeluruh dan parsial. Analisis strategi pembangunan desa yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan :

a. Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)

Analisis SWOT merupakan cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

(Rangkuti, 2006). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT didahului dengan identifikasi melalui evaluasi nilai faktor internal dan evaluasi nilai faktor eksternal.

Proses yang dilakukan dalam analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih tepat perlu melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pengambilan data yaitu evaluasi faktor eksternal dan internal
Posisi perusahaan/institusi dapat dikelompokkan dalam kuadran.
- 2) Tahap analisis yaitu pembuatan matriks internal eksternal dan matriks SWOT
- 3) Tahap pengambilan keputusan, dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi perusahaan dapat dilakukan dengan wawancara terhadap ahli perusahaan yang bersangkutan. Langkah-langkah pembuatan matriks internal eksternal sebagai berikut:
 1. Pada kolom 1 dilakukan penyusunan terhadap semua faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan dengan membagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal.
 2. Pemberian bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Bobot dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pembobotan.
 3. Pada kolom 3 diisi perhitungan rating terhadap faktor-faktor tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi instansi yang bersangkutan. Rentang nilai rating 1 berarti kurang berpengaruh sampai 5 berarti sangat berpengaruh.

4. Kolom 4 diisi dengan cara mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3.
5. Penjumlahan total skor pembobotan untuk masing-masing faktor internal (kekuatan-kelemahan) dan eksternal (peluang-ancaman). Untuk memperoleh strategi yang tepat bagi perusahaan.

b. Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM)

Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM) merupakan alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan keberhasilan kunci internal-eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Secara konsep, tujuan QSPM untuk menetapkan kemenarikan relatif dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan strategi paling baik untuk diimplementasikan. Ardian (2017) menjelaskan bahwa analisis Matriks QSPM merupakan tahap keputusan terakhir untuk menentukan strategi terbaik yang dapat dijalankan oleh perusahaan dari alternatif-alternatif strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Kurniastuti (2018) menjelaskan bahwa Matriks QSPM digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang paling cocok dengan lingkungan internal dan eksternal yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Jumlah *set alternatif* strategi yang dimasukkan dalam QSPM bisa berapa saja, jumlah strategi dalam set juga bisa berapa saja, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama lain (David, 2006). Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat Matriks QSPM sebagai berikut:

- 1) Membuat daftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM.
- 2) Memberikan bobot pada masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Bobot ini sama dengan yang ada di matriks EFE dan matriks IFE.

- 3) Meneliti matriks-matriks pada tahap ke dua dan identifikasikan strategi alternatif
- 4) Tetapkan *Attractiveness Score* (AS), ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Batasan *Attractiveness Score* adalah 1 = tidak menarik, 2 = cukup menarik, 3 = menarik

c. Analisis Hirarki Proses (AHP)

AHP merupakan metode pengambilan keputusan terhadap masalah penentuan prioritas pilihan dari berbagai alternatif yang dapat membantu kerangka berfikir manusia. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada awal tahun 1970-an. Dasar berpikir metode AHP adalah proses membentuk skor secara numerik untuk menyusun ranking setiap alternatif keputusan berbasis pada bagaimana sebaiknya alternatif itu dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan (Saaty, 1986). Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat, yang dimulai dengan *goal/sasaran*, lalu kriteria level pertama, subkriteria dan akhirnya alternatif (Saaty, 1986). Arham dkk (2019) menjelaskan bahwa metode AHP paling banyak digunakan pada penelitian pengambilan keputusan *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) atau multikriteria. Peningkatan trend tersebut didukung oleh kemampuan klarifikasi mengenai karakterisasi kriteria dan indikator dalam pengukuran multikriteria (Diaz *et al.*, 2017)

Metode AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah karena struktur yang berhirarki, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan, dan memperhitungkan analisis sensitifitas pengambilan keputusan. Metode AHP terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami yaitu *decomposition*, *comparative judgement*, *synthesis of priority*, *logical consistency*.

- a) *Decomposition* merupakan tahap memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses
- b) Hirarki keputusan disebut *complete* jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan, sedangkan hirarki keputusan *incomplete* yakni tidak semua unsur jenjang mempunyai hubungan
- c) *Comparative judgement*

Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian akan tampak lebih jelas bila disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison* dengan menggunakan skala kepentingan seperti pada Tabel 2:

Tabel 2. Skala penilaian perbandingan berpasangan

Tingkat kepentingan	Definisi
1	Sama pentingnya dengan yang lain
3	Moderat pentingnya disbanding yang lain
5	Kuat pentingnya disbanding dengan yang lain
7	Sangat kuat pentingnya disbanding yang lain
9	Ekstrim pentingnya disbanding yang lain
2, 4, 6, 8	Nilai di antara dua penilaian yang berdekatan
<i>Reciprocal</i>	Jika elemen i memiliki salah satu angka di atas disbanding elemen j, maka j memiliki nilai kebalikannya ketika disbanding elemen i.

Sumber: Saaty (1986)

Perbedaan model AHP dibandingkan dengan model-model pengambilan keputusan yang lain adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan yang lain adalah bebas satu sama lain. Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dengan menggunakan AHP adalah:

- 1) Kesatuan yaitu AHP memberikan satu model tunggal
- 2) Kompleksitas yaitu AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan memecahkan persoalan kompleks,
- 3) Saling ketergantungan yaitu AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen

- 4) Penyusunan hirarki yaitu AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah elemen-elemen dalam setiap tingkat.
- 5) Pengukuran yaitu AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan terwujud suatu metode untuk menetapkan prioritas,
- 6) Konsistensi yaitu AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas,
- 7) Sintesis yaitu AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

Penentuan pengambilan keputusan, konsep AHP ditentukan oleh pendapat para ahli. Para ahli dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar sesuai dengan bidang keahliannya

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dasar dalam memperoleh informasi tambahan mengenai penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengambil Topik Pembangunan Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Menuju Desa Wisata Berkelanjutan. Penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, namun dalam penggunaan metode analisis ada beberapa kesamaan yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Metode analisis yang sama digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan alat analisis SWOT, QSPM, dan alat Analisis Hirarki Proses (AHP) dalam menjawab tujuan penelitian.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Penelitian ini dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan menggunakan pendekatan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi aspek ekonomi, sosial (budaya), lingkungan dan kelembagaan serta menggunakan pendekatan perencanaan kolaboratif dalam menyusun rencana program-program pembangunan pariwisata berkelanjutan, sedangkan dalam peneliti terdahulu terdapat satu penelitian yang menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan mengacu pada teori Cittaslow (1986) dalam pembangunan wilayah yang berlokasi di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- 2) Terdapat penelitian terdahulu menggunakan alat metode analisis yang berbeda dalam menentukan strategi pembangunan suatu wilayah seperti pada peneliti terdahulu menggunakan analisis deskriptif, evaluatif, analisis pembangunan, LQ, SWOT dan AHP, sedangkan penelitian ini menggunakan gabungan dari analisis SWOT, QSPM dan AHP yang mana keluarannya yaitu menentukan program prioritas dalam membangun desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan.

Tabel 3. Penelitian terdahulu dengan metode penelitian serupa

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
1.	Wulandari (2017)	Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran	Menyusun strategi perencanaan pembangunan desa Sukaresik	Analisis deskriptif kualitatif	Strategi perencanaan pembangunan Desa Sukaresik secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal, seperti perumusan program pembangunan belum dilakukan oleh perangkat desa dan anggota masyarakat yang mewakili
2.	Mulyawan, Barus, dan Firdaus (2015)	Potensi Ekonomi dan Arah Program Pembangunan Wilayah Desa-Desa Penyangga TNUK	Menyusun arahan program pembangunan perekonomian di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu	1. Analisis SWOT 2. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) 3. Analisis <i>Shift share</i>	1. Arahan program di Kecamatan Sumur yaitu program penerapan teknologi perikanan modern dan pembangunan pelabuhan 2. Arah program di Kecamatan Cimanggu yaitu program penerapan teknologi pertanian, fasilitas teknologi dan pengolahan pasca panen

Tabel 3. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
3.	Herdiana Dian (2018)	Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Persepektif <i>Participatory Development Planning</i>	Mengkaji efektivitas perencanaan pembangunan desa dalam perspektif <i>participatory development planning</i>	Analisis eksploratif	Perencanaan pembangunan masih dimaknai sebagai aktifitas vertikal (tunduk pada kekuasaan atas/pemerintah daerah) bukan kepada perencanaan pembangunan yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, implikasinya tidak hanya kepada gagalnya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, tetapi juga gagalnya menghadirkan masyarakat sebagai kekuatan sosial yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan desa.
4.	Alfiaturrahman (2016)	Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	Mengetahui kondisi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Analisis deskriptif kualitatif	Proses perencanaan belum dilaksanakan dengan baik karena beberapa tahap perkembangan dalam proses perencanaan desa belum dilaksanakan dan partisipasi masyarakat masih rendah

Tabel 3. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
5.	Tapatfeto dan Bessie (2018)	Strategi Pembangunan Objek Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kunjungan (Studi Pada Objek Wisata Pantai Oetune Kabupaten TTS)	Mengetahui strategi pembangunan dalam upaya peningkatan kunjungan wisata	Analisis SWOT	Perumusan strategi berdasarkan berbagai aspek pembangunan seperti wisatawan, sarana transportasi daya tarik obyek wisata yang dimiliki, sarana dan prasarana penunjang lingkungan obyek wisata, pemanfaatan telekomunikasi sebagai media promosi, serta didukung dengan dana dan SDM yang berkualitas
6.	Kirana dan Artisa (2018)	Pengembangan Desa Wisata Berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Batu	Menganalisis pengembangan desa wisata berbasis <i>collaborative governance</i>	Analisis eksploratif	Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata

Tabel 3. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
7.	Kuswanda dan Mukhtar (2006)	Strategi Pembangunan Kelembagaan Zona Penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Penentuan alternatif strategi untuk mengembangkan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam di zona penyangga TNBT secara lestari	Analisis Hirarki Proses (AHP)	Alternatif strategi prioritas yang dapat diimplementasikan adalah pembinaan dan pemberdayaan berbagai <i>stakeholders</i> pembangunan bagi kepentingan konservasi dan kesejahteraan (0,436)
8.	Elviana, Mutia, dan Yunisya (2018)	Upaya Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Kalanganyar Sidoarjo menjadi Desa Wisata	Mengeksplorasi kekayaan dan potensi kawasan Kalanganyar	Analisis eksploratif dan diskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik terhadap system pembuangan sampah padat maupun limbah cair 2. Perlu diantisipasi adanya pendangkalan air sungai yang diakibatkan oleh endapan lumpur
9.	Lase, Sihombing, dan Thamrin (2018)	Analisis Strategi Pembangunan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias	Menentukan strategi pebangunan Kawasan Wisata Soziana Kabupaten Nias	Analisis SWOT	Mencari investor yang tertarik untuk menanamkan modal dalam membangun kawasan Soziana, sehingga baik pemerintah daerah maupun investor dapat saling bekerjasama agar kawasan ini cepat terealisasikan dengan baik.

Tabel 3. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
10.	Nurhasanah, Alvi, dan Persada (2017)	Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung	Mengidentifikasi pemberdayaan dan peran masyarakat dalam sektor pariwisata di Pulau Pahawang	Analisis <i>Qualitative Content</i> yang terdiri dari <i>emphasizes emerging categorie</i> dan <i>recognizes the significance for understanding the meanings</i>	Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan <i>stakeholders</i> dapat meningkatkan kesempatan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Pulau Pahawang. Minimnya peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengelola <i>ecotourism</i> menghambat perwujudan pariwisata berkelanjutan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

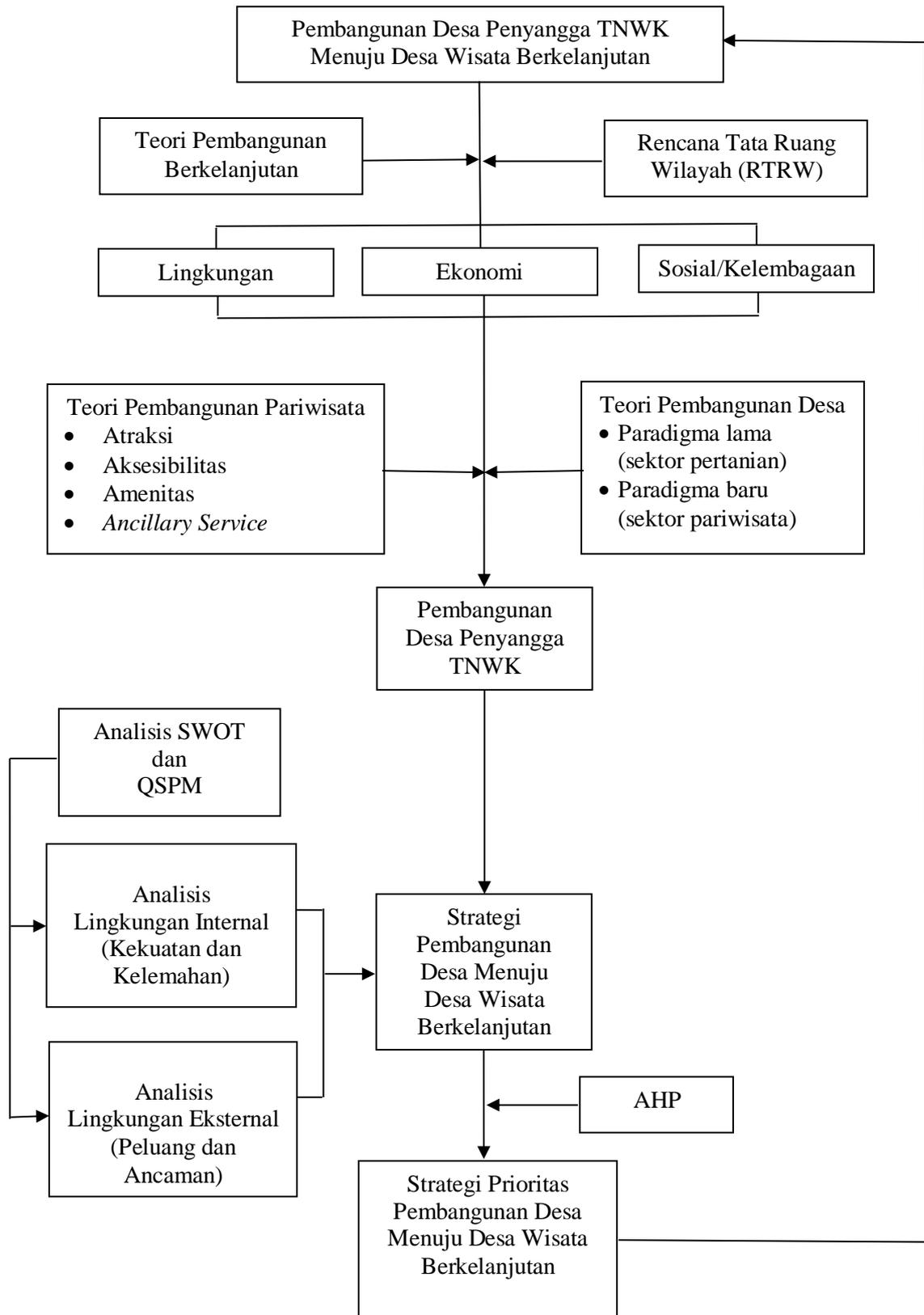
B. Kerangka Pemikiran

Desa penyangga TNWK berperan menjaga kawasan suaka alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari dalam atau luar kawasan yang dapat memberikan perubahan pada fungsi kawasan TNWK sebagai kawasan lindung. Peraturan kawasan lindung pada pola ruang wilayah yang termuat di Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjelaskan perlunya tindakan pencegahan atas aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu pengelolaan desa penyangga mempertimbangkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial/kelembagaan sebagai upaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, 2018).

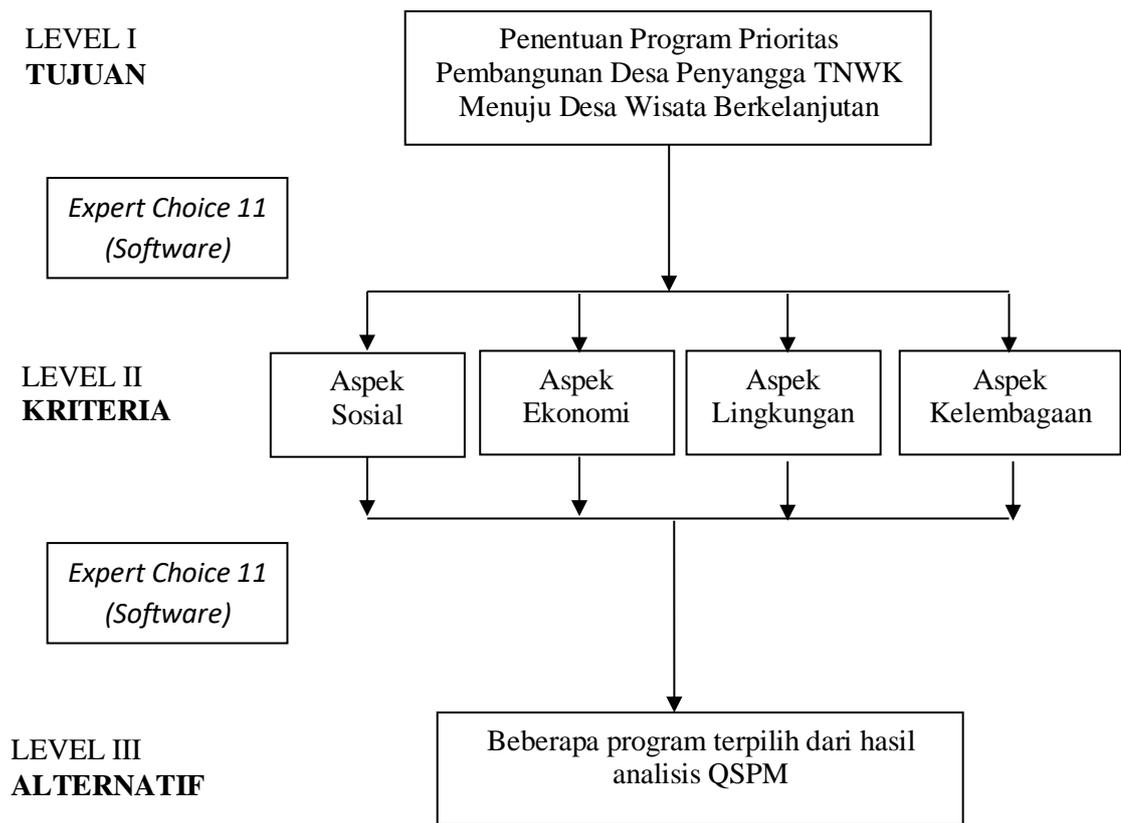
Paradigma baru pembangunan perdesaan dapat menjadi alternatif untuk terciptanya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan menggali kekuatan potensi lokal desa yang tidak hanya terfokus pada satu sektor pertanian saja. Pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata diharapkan mampu menciptakan nilai tambah perekonomian masyarakat setempat dan mampu mengintegrasikan lintas sektoral. (Kirana dan Artisa (2018) menjelaskan untuk mengimplementasikan paradigma baru pembangunan perdesaan diperlukan dukungan dari kelembagaan, peraturan daerah, dan koordinasi antar *stakeholders* sehingga mampu mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah antar kawasan lindung dan wilayah desa penyangga dalam membangun tata ruang wilayah yang berkualitas.

Pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata menurut Cooper *et al* (1993) perlu memperhatikan beberapa komponen yang harus dimiliki objek wisata yang dikenal dengan 4 A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan *Ancillary Service*. Berbagai arahan berupa strategi diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa wisata dengan menganalisis kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman yang dimiliki desa penyangga TNWK. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang telah disusun selanjutnya diolah dengan teknik QSPM sehingga terjabarkan matriks IFAS dan matriks EFAS. Hasil olahan tersebut akan tersusun beberapa strategi terbaik yang ditetapkan dan lalu diputuskan strategi prioritas untuk diimplementasikan dengan menggunakan teknik Analisis Hirarki Proses (AHP). Berikut kerangka pemikiran penelitian pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka pemikiran pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan.



Gambar 4. Kerangka AHP penentuan program prioritas pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang dilakukan secara *offline* dan *online* (*virtual zoom meeting*). Data sekunder berupa data dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh lembaga atau instansi-instansi terkait dan studi pustaka seperti dari pemerintah desa setempat, Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok dan menggali maupun mengembangkan akan potensi desa penyangga TNWK secara lebih terperinci dan bersifat terbuka dalam menyusun instrument (Yusuf, 2017).

B. Konsep Dasar

Konsep dasar yang akan diteliti dan digunakan untuk memperoleh dan menganalisis suatu data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Paradigma lama pembangunan adalah pembangunan desa Penyangga TNWK yang didominasi oleh sektor pertanian.
2. Paradigma baru pembangunan adalah pembangunan desa Penyangga TNWK yang tidak didominasi oleh sektor pertanian saja namun sektor industri dan jasa dikembangkan.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan antara aspek sosial (budaya), ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

4. Aspek sosial (budaya) meliputi stabilitas penduduk, kebutuhan dasar yang terpenuhi, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat desa penyangga TNWK dalam pengambilan keputusan sebagai objek dan subjek pembangunan.
5. Aspek ekonomi meliputi kegiatan ekonomi masyarakat desa penyangga TNWK dengan melakukan inovasi peningkatan nilai tambah.
6. Aspek lingkungan meliputi kegiatan masyarakat desa penyangga TNWK menjaga kelestarian sumber daya alam.
7. Aspek kelembagaan meliputi tata kelola politik pemerintah desa penyangga menjaga kawasan TNWK.
8. Perencanaan kolaboratif adalah pandangan dari pemangku kepentingan yang meliputi akademisi, *businessman*, *community*, *government*, dan media dalam menangani permasalahan desa penyangga TNWK.
9. Akademisi adalah tenaga pendidik yang melakukan pengabdian masyarakat di lokasi desa penyangga TNWK dan memiliki berbagai riset tentang pembangunan pariwisata berbasis penelitian.
10. *Businessman* adalah masyarakat sebagai penyelenggara bisnis pariwisata.
11. *Community* meliputi masyarakat desa penyangga TNWK dan komunitas-komunitas (NGO/LSM) yang berperan mendukung pariwisata.
12. *Government* adalah regulator, fasilitator, mediator, dan penyedia prasarana bagi desa penyangga TNWK.
13. Media adalah lembaga yang meliput berita seputar desa penyangga TNWK dan kawasan TNWK.
14. Atraksi meliputi alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni pertunjukkan.
15. Aksesibilitas meliputi ketersediaan transportasi lokal dan terminal.
16. Amenitas meliputi ketersediaan akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan.
17. *Ancillary services* meliputi pelayanan wisata seperti *destination marketing*, *management organization*, *conventional and visitor bureau*.

18. Analisis SWOT adalah analisis yang membandingkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) desa penyangga TNWK.
19. Analisis QSPM meliputi beragam strategi alternatif yang telah dievaluasi untuk diimplementasikan menjadi program berkelanjutan.
20. Analisis AHP adalah analisis menentukan alternatif program prioritas pembangunan desa penyangga menuju desa wisata berkelanjutan untuk diimplementasikan.

C. Lokasi penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Rantau Jaya Udik II, Labuhan Ratu VI dan Braja Harjosari Kabupaten Lampung Timur. Lokasi penelitian ditentukan secara (*purposive*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Desa Rantau Jaya Udik II dikategorikan sebagai desa penyangga yang tertinggal karena memiliki IDM sebesar 59,56% (2019). Lokasi desa terdapat fasilitas pendidikan lingkungan dan wisata yang terletak dekat kantor RPTN Susukan Baru. Bentuk dukungan yang lain dari Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II yaitu memasukkan rencana pengembangan taman rekreasi Way Kambas, penguatan seni budaya kuda lumping, dan pelatihan industri pangan skala rumah tangga sebagai pendukung wisata.
- 2) Desa Labuhan Ratu VI dikategorikan sebagai desa penyangga yang berkembang karena memiliki IDM sebesar 61,46% (2019). Sumber daya masyarakat partisipatif membangun Desa Labuhan Ratu VI menjadi desa wisata dan terdapat berbagai jenis wisata seperti agrowisata, ekowisata, dan wisata sejarah. Kerajinan lokal berbahan baku bambu diproduksi di desa ini.
- 3) Desa Braja Harjosari dikategorikan sebagai desa penyangga yang maju karena memiliki nilai IDM sebesar 76,02% (2019). Kegiatan wisata Desa Braja Harjosari cukup berkembang dan memiliki berbagai paket wisata yang ditawarkan dan terdapat *homestay*. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga menjadikan Desa Braja Harjosari sebagai model desa wisata dan mandiri pangan pada tahun 2016 di Lampung Timur.

Desa-desa penyangga tersebut dijadikan objek penelitian supaya pengambilan sampel desa penyangga ditentukan secara proporsional. Keadaan tersebut mencerminkan keadaan desa penyangga TNWK secara keseluruhan. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan November sampai Desember 2020 di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung

Responden penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan responden paham atau bisa dikatakan ahli dibidangnya sehingga memungkinkan data yang diisi dalam kuesioner merupakan suatu data yang telah mempunyai nilai objektivitas yang tinggi. Karakteristik responden yang akan diwawancarai dijabarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Profil responden penelitian

<i>Stakeholders</i>	Status	Frekuensi
Akademisi	Dosen memahami ilmu kewilayahan dan pariwisata	2
<i>Businessman</i>	Pengusaha yang berinvestasi untuk pembangunan desa	2
<i>Community</i>	Masyarakat (Pokdarwis) dan komunitas-komunitas (NGO/LSM)	3
<i>Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Balai TNWK • Kepala Dinas LH Provinsi Lampung dan Kepala Dinas LH Kabupaten Lampung Timur • Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Timur 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur • Kepala Desa Penyangga TNWK 	
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Redaksi Ini Lampung.com 	1
Total		16

Sumber: Data primer (2020)

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis SWOT, matriks QSPM dan AHP untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Analisis data untuk menjawab tujuan pertama

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab tujuan pertama (1) dari penelitian. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data yang menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas untuk mengetahui kinerja yang ditinjau dari aspek sosial (budaya), ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat serta berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendeskripsikan faktor pendorong maupun faktor penghambat pembangunan desa wisata.

2. Analisis data untuk menjawab tujuan ke dua

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan ke dua dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan QSPM. Proses analisis strategi pembangunan desa penyangga TNWK menuju desa wisata berkelanjutan melalui empat tahap analisis sebagai berikut :

1) Tahap pengumpulan data

Tahap ini terdiri dari pengumpulan, pengelompokkan dan pra analisis data eksternal dan data internal. Sistem pendekatan yang digunakan untuk data internal dengan mengidentifikasi beberapa komponen-komponen terkait pembangunan pariwisata menurut Cooper *et al* (1993) yang dikenal dengan 4 A yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan *ancillary service*. Data eksternal menggunakan sistem pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan mengidentifikasi aspek sosial (budaya), ekonomi, lingkungan, dan

kelembagaan. Berikut matriks faktor strategi internal dan eksternal berdasarkan data pra survei yang disesuaikan dengan teori.

1.1) Matrik faktor internal

- a) Menentukan komponen-komponen faktor dalam kolom 2
 1. Atraksi
Mempertunjukkan alam, seni dan kebudayaan daerah yang menarik wisatawan berkunjung;
 2. Aksesibilitas
Tersedianya transportasi lokal dan adanya terminal
 3. Amenitas
Tersedianya akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan di lingkungan desa wisata
 4. *Ancillary service*
Terdapat organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisata seperti *destination marketing, management organization, conventional and visitor bureau*
- b) Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 0 (tidak penting) sampai 100 (paling penting) berdasarkan pengaruh komponen-komponen faktor tersebut terhadap pembangunan desa wisata (semua bobot tersebut harus berjumlah 100% yang akan menjadi bobot bagi masing-masing faktor);
- c) Menghitung rating (dalam kolom 4) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 3 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi desa wisata. Variable yang bersifat positif (semua variable yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai +1 sampai +3 sangat baik. Pemberian nilai rating kelemahan adalah sebaliknya.

- d) Mengalikan bobot pada kolom 3 dengan rating pada kolom 4, untuk memperoleh total skor dalam kolom 5. Besarnya persentase dalam komponen tergantung pada besarnya pengaruh langsung komponen tersebut pada pembangunan desa wisata, dan jumlah komponen harus 100%.

Tabel 5. Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kekuatan (*Strengths*)

Komponen	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor	Rank
Atraksi					
Aksesibilitas					
Amenitas					
<i>Ancillary services</i>					

Sumber: Rangkuti (2006)

Keterangan pemberian rating:

3 = kekuatan yang dimiliki desa wisata kuat

2 = kekuatan yang dimiliki desa wisata cukup kuat

1 = kekuatan yang dimiliki desa wisata rendah

Tabel 6. Kerangka matrik faktor strategi internal untuk kelemahan (*Weaknesses*)

Komponen	Kelemahan	Bobot	Rating	Skor	Rank
Atraksi					
Aksesibilitas					
Amenitas					
<i>Ancillary services</i>					

Sumber: Rangkuti (2006)

Keterangan pemberian rating:

3 = kelemahan yang dimiliki desa wisata mudah dipecahkan

2 = kelemahan yang dimiliki desa wisata cukup mudah dipecahkan

1 = kelemahan yang dimiliki desa wisata sulit dipecahkan

1.2) Matrik faktor eksternal

- a) Menentukan komponen-komponen faktor dalam kolom 2
 1. Sosial (budaya)

Aspek sosial dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung pembangunan desa wisata dalam hal interaksi, interrelasi, interdependensi dan mengadopsi teknologi informasi.
 2. Ekonomi

Aspek ekonomi memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan.
 3. Lingkungan

Aspek lingkungan sebagai upaya tercapainya tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan tanpa mengurangi tekanan terhadap lingkungan fisik ke dalam batas-batas sistem ekologi.
 4. Kelembagaan

Aspek kelembagaan memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola politik untuk membangun desa wisata.
- b) Memberi bobot masing-masing faktor tersebut,
- c) Menghitung rating (dalam kolom 4) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 3 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi desa wisata.
- d) Mengalikan bobot pada kolom 3 dengan rating pada kolom 4, untuk memperoleh total skor dalam kolom 5. Besarnya persentase dalam komponen tergantung pada besarnya pengaruh langsung komponen tersebut pada pembangunan desa wisata, dan jumlah komponen harus 100%.

Tabel 7. Kerangka matrik faktor strategi eksternal untuk peluang (*Opportunities*)

Komponen	Peluang	Bobot	Rating	Skor	Rank
Sosial (budaya)					
Ekonomi					
Lingkungan					
Kelembagaan					

Sumber: Rangkuti (2006)

Keterangan pemberian rating:

3 = peluang dimiliki desa wisata yang mudah diraih

2 = peluang dimiliki desa wisata yang cukup mudah diraih

1 = peluang dimiliki desa wisata yang sulit diraih

Tabel 8. Kerangka matrik faktor strategi eksternal untuk ancaman (*Threats*)

Komponen	Ancaman	Bobot	Rating	Skor	Rank
Sosial (budaya)					
Ekonomi					
Lingkungan					
Kelembagaan					

Sumber: Rangkuti (2006)

Keterangan pemberian rating

3 = ancaman yang dimiliki desa wisata mudah diatasi

2 = ancaman yang dimiliki desa wisata cukup mudah diatasi

1 = ancaman yang dimiliki desa wisata sulit diatasi

2) Analisis Matriks IE

Matriks I-E menggunakan parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal desa penyangga yang masing-masing diidentifikasi dalam elemen eksternal dan internal melalui matriks IFE dan EFE. Tujuan penggunaan matriks I-E adalah untuk memperoleh strategi pembangunan desa penyangga menuju desa wisata berkelanjutan. Matriks I-E dapat mengidentifikasi sembilan sel strategi, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama yaitu:

- a. Sel I, II, atau IV disebut (*growth and build*). Strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal),
- b. Sel III, V, atau VII terbaik dapat dikelola dengan strategi mempertahankan dan memelihara (*hold and maintain*),
- c. Sel VI, VIII, atau IX adalah mengambil hasil atau melepaskan (*harvest and divest*), yaitu usaha memperkecil atau mengurangi usaha (David, 2009).

Dalam matriks I-E, total skor bobot IFE pada sumbu x dan total skor bobot EFE pada sumbu y. Pada sumbu x dari matriks I-E, total skor bobot IFE dikelompokkan ke dalam kuat (3,0-4,0), rata-rata (2,0-2,99) dan lemah (1,00-1,99). Begitu pula dengan sumbu y, total skor bobot EFE dikelompokkan dalam tinggi (3,0-4,0), menengah (2,0-2,99) dan rendah (1,0-1,99). Matriks I-E dapat dilihat pada Gambar 5.

		THE IFAS		
		TOTAL WEIGHTED SCORES		
THE EFAS		Kuat 3,0	Sedang 2,0	Lemah 1,0
TOTAL WEIGHTED SCORES	Tinggi 3,0	I	II	III
	Sedang 2,0	IV	V	VI
	Rendah 1,0	VII	VIII	IX

Gambar 5. Matriks IE.

Sumber: David (2009)

3) Analisis Matriks SWOT

Tahapan dalam membentuk matriks SWOT, yaitu :

1. Menentukan faktor-faktor kekuatan desa wisata
2. Menentukan faktor-faktor kelemahan desa wisata

3. Menentukan faktor-faktor peluang desa wisata
4. Menentukan faktor-faktor ancaman desa wisata
5. Menyesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi S-O. Menempatkan seluruh hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan
6. Menyesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi W-O. Menempatkan seluruh hasil strategi WO dalam sel yang ditentukan
7. Menyesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi S-T. Menempatkan seluruh hasil strategi ST dalam sel yang ditentukan
8. Menyesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi W-T. Menempatkan seluruh hasil strategi WT dalam sel yang ditentukan

SWOT	Kekuatan (S) Daftar Kekuatan (tentukan 5-10 faktor peluang internal)	Kelemahaan (W) Daftar Kelemahan (tentukan 5-10 faktor peluang internal)	
	Peluang (O) Daftar Peluang (tentukan 5-10 faktor peluang eksternal)	Strategi S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
	Ancaman (T) Daftar Ancaman (tentukan 5-10 faktor peluang eksternal)	Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 6. Matriks SWOT.

Sumber: Hunger dan Wheelen (2003)

4) Analisis Matriks QSPM

Tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis QSPM merupakan penjabaran strategi atau program yang sudah terbentuk dari matriks SWOT dalam penelitian ini untuk ditentukan strategi atau program

yang diprioritaskan. Langkah-langkah dalam menentukan strategi prioritas dengan analisis QSPM adalah :

- a) Membuat daftar faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman)
- b) Memberikan bobot untuk setiap faktor internal dan eksternal. Nilai harus identik dengan nilai yang diberikan pada matriks IFE dan EFE.
- c) Mengidentifikasi strategi alternatif yang diperoleh dari matriks Internal dan Eksternal dan SWOT yang layak diimplementasikan
- d) Menentukan Nilai Daya Tarik/*Attractiveness Score* (AS) yang diidentifikasi sebagai angka yang menunjukkan daya tarik relatif masing-masing strategi pada suatu rangkaian alternatif tertentu. AS harus diberikan masing-masing strategi terhadap yang lain dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Cakupan AS; 1 = tidak menarik, 2 = cukup menarik, 3 = menarik. Jika hasil jawaban antar pertanyaan tersebut adalah tidak, hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing faktor kunci tidak mempunyai pengaruh atas pilihan khusus yang dibuat, oleh karenanya jangan beri AS pada strategi-strategi dalam rangkaian tersebut
- e) Menghitung Total Nilai Daya Tarik/*Total Attractiveness Score* (TAS) didefinisikan sebagai hasil mengalikan bobot (langkah 2) dengan AS di masing-masing strategi alternatif, dengan hanya mempertimbangkan dampak dari faktor keberhasilan krisis internal dan eksternal yang berdekatan. Semakin tinggi TAS semakin menarik strategi alternatif.
- f) Menghitung jumlah TAS. Jumlah TAS mengungkapkan strategi yang paling menarik dalam rangkaian alternatif. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin menarik strategi tersebut.

Tabel 9. Matriks *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM)

No	Faktor-Faktor Kunci Bobot	Alternatif Strategi					
		Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
1.	Faktor Kunci Internal						
2.	Faktor Kunci Eksternal						
	Jumlah						

Sumber: David (2009)

3. Analisis data untuk menjawab tujuan ketiga

Alat Analisis Hirarki Proses (AHP) digunakan untuk menjawab tujuan ketiga penelitian ini yaitu menentukan alternatif strategi prioritas pembangunan Desa Penyangga TNWK yang tepat untuk diterapkan menuju desa wisata berkelanjutan. Penyelesaian analisis data menggunakan metode AHP yang diolah dengan bantuan perangkat lunak *Expert Choice*. Metode AHP digunakan untuk menjawab tujuan pada penelitian ini melalui alat ukur skala penilaian perbandingan berpasangan 1-9 yang pada skala pengukuran penelitian termasuk skala likert (Saaty, 1986). Sugiyono (2015) menjelaskan skala likert digunakan untuk mengembangkan instrument yang digunakan untuk mengukur pendapat seseorang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan.

Saaty (1986) mengemukakan bahwa skala 1 menunjukkan tingkat kepentingan yang paling rendah sampai dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan kepentingan yang paling tinggi. Hasil dari pengukuran penilaian perbandingan berpasangan dibobot lalu diolah menjadi data ordinal. Tahapan pelaksanaan metode AHP sebagai berikut.

- 1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi,
- 2) Membuat struktur hirarki,
- 3) Membuat matrik perbandingan berpasangan,
- 4) Melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan,

- 5) Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya,
- 6) Mengulangi langkah 3, 4, 5, untuk seluruh tingkat hirarki,
- 7) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan, dan
- 8) Memeriksa konsistensi hirarki (jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali).

Pada penelitian ini persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan dalam penyusunan hirarki, yang dimulai pada level 1 tujuan, level 2 kriteria, dan level 3 alternatif yang tertera pada Gambar 4.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian Desa Penyangga TNWK

Lokasi penelitian dilakukan di tiga (3) desa penyangga TNWK yaitu Desa Rantau Jaya Udik II berada di Kecamatan Sukadana, Desa Labuhan Ratu VI berada di Kecamatan Labuhan Ratu, dan Desa Braja Harjosari berada di Kecamatan Braja Salebah. Berikut data ke tiga (desa penyangga) yang ditinjau dari keadaan geografis, keadaan iklim, keadaan demografis, dan potensi wilayah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, 2020) :

1. Keadaan Geografis

Berikut data secara geografis di lokasi penelitian desa penyangga TNWK :

- a. Desa Rantau Jaya Udik II memiliki luas wilayah 30,00 km² atau 2549,69 ha. Secara topografi, luas kemiringan lahan rata-rata di desa ini adalah datar dengan luasan 30 ha, ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 26 mdpl. Jarak dari kantor kepala desa ke kecamatan yaitu 9 km dan ke ibu kota kabupaten yaitu 7 km.
- b. Desa Labuhan Ratu VI memiliki luas wilayah 11,83 km² dengan topografi dataran dan tinggi wilayah di atas permukaan laut rata-rata 38 mdpl. Berada di titik koordinat Lintang Selatan -5,1099 dan 105,6917 Bujur Timur. Jarak dari kantor kepala desa ke Kecamatan Labuhan Ratu yaitu 2,60 km dan ke ibu kota kabupaten 26,90 km.
- c. Desa Braja Harjosari memiliki luas wilayah 30,77 km² dengan topografi dataran dan tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) 27,8 m. Berada di titik koordinat Lintang Selatan -5,1867 dan 105,7637 Bujur Timur. Jarak dari

kantor kepala desa ke Kecamatan Braja Selehah yaitu 0,75 km dan ke ibu kota kabupaten 37,70 km.

2. Keadaan Iklim

Iklim di lokasi penelitian desa penyangga TNWK Kabupaten Lampung timur termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni. Suhu rata-rata harian 24 °C sampai 30°C dengan curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500 mm dan kecepatan angin 10 km/jam.

3. Keadaan Demografis

Data demografis di lokasi penelitian desa penyangga TNWK:

- a. Jumlah penduduk Desa Rantau Jaya Udik II dari tahun 2010 berjumlah 4155 jiwa, tahun 2018 berjumlah 4418 jiwa, dan pada tahun 2019 berjumlah 4438 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per-tahun dari tahun (2010-2018) adalah 6,33% dan dari tahun (2018-2019) adalah 0,45% dengan kepadatan penduduk 148 jiwa per km².
- b. Jumlah penduduk Desa Labuhan Ratu VI mengalami peningkatan juga dari tahun 2010 berjumlah 3161 jiwa, tahun 2018 berjumlah 3409 jiwa, dan pada tahun 2019 berjumlah 3465 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per-tahun dari tahun (2010-2018) adalah 7,85% dan pada tahun (2018-2019) adalah 2,46% dengan kepadatan penduduk 296 jiwa per km².
- c. Jumlah penduduk Desa Braja Harjosasi terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya dari tahun 2010 berjumlah 5300 jiwa, pada tahun 2018 berjumlah 6051 jiwa, dan pada tahun 2019 berjumlah 11351 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per-tahun dari tahun (2010-2018) adalah 14,17% dan pada tahun (2018-2019) adalah 87,59% dengan kepadatan penduduk 197 jiwa per km².

4. Potensi Wilayah

Lokasi desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi TNWK menjadikan Desa Rantau Jaya Udik II, Desa Labuhan Ratu VI, dan Desa Braja Harjosari memiliki posisi strategis untuk mendukung Industri Pariwisata Lampung Timur. Industri pariwisata pada desa penyangga diperlukan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tidak terlepas akan kaitan hulu maupun ke hilir. Tersaji data mengenai berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang berada pada lokasi penelitian sebagai upaya penunjang industri pariwisata sebagai berikut.

Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa data jumlah fasilitas sekolah dan tingkat pendidikan pada lokasi penelitian yang terlengkap dan terbanyak berada di Desa Braja Harjosari dan Desa Labuhan Ratu VI, sedangkan Desa Rantau Jaya Udik II masih belum memiliki fasilitas sekolah yang lengkap dan masih sedikit jumlah fasilitas sekolah yang berada. Fasilitas pelayanan pendidikan yang minim di Desa Rantau Jaya Udik II dapat mengindikasikan menjadi faktor pendorong peningkatan akses masyarakat secara illegal ke kawasan TNWK untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena minimnya tingkat pendidikan yang berpengaruh pada kualitas dari sumber daya masyarakat.

Tabel 10. Jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah dan tingkat pendidikan di tiap desa 2019/2020

Fasilitas Sekolah	Jumlah Fasilitas Sekolah		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
TK	-	1	2
SD	2	2	6
SMP	1	-	5
SMA	-	1	4
SMK	-	-	3

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data fasilitas kesehatan di tiap lokasi penelitian pada Tabel 11 menunjukkan bahwa sarana kesehatan yang mendekati terdapat di Desa Braja Harjosari, yakni memiliki tempat Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Apotek, Poskesdes dan Prkatik Bidan. Desa Labuhan Ratu VI hanya memiliki Posyandu, Poskesdes, dan Praktik Bidan sedangkan pada desa Rantau Jaya Udik II hanya memiliki Poskesdes dan Tempat Praktik Bidan, yang disajikan pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Jumlah desa yang memiliki sarana kesehatan 2019/2020

Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Rumah Sakit	-	-	-
Rumah Sakit Bersalin	-	-	1
Poliklinik	-	-	1
Puskesmas	-	-	1
Puskesmas Pembantu	-	-	-
Apotek	-	-	2
Posyandu	-	4	-
Poskesdes	1	1	1
Tempat Praktik Bidan	2	3	9

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Tabel 12 menunjukkan bahwa Desa Rantau Jaya Udik II memiliki fasilitas peribadatan yang cukup lengkap dan cukup banyak, yakni dengan Masjid berjumlah 9, Mushola berjumlah 19, Gereja Porotestas berjumlah 1, dan Gereja Katholik berjumlah 2, namun tidak memiliki Pura dan Vihara sedangkan pada Desa Braja Harjosari memiliki fasilitas peribadatan Pura. Tersaji data untuk lebih jelasnya pada Tabel 12.

Tabel 12. Jumlah tempat peribadatan di tiap desa 2019/2020

Sarana Peribadatan	Jumlah Sarana Peribadatan		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Masjid	9	7	5
Mushola	19	7	17
Gereja Protestan	1	-	-
Gereja Katholik	2	-	-
Pura	-	-	3
Vihara	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data luas lahan dan jenis penggunaan lahan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa Desa Braja Harjosari memiliki pemanfaatan lahan pertanian sawah yang cukup luas dibandingkan Desa Rantau Jaya Udik II dan Desa Labuhan Ratu VI. Pemanfaatan untuk lahan pertanian non sawah menunjukkan Desa Labuhan Ratu VI memiliki luas lahan yang lebih luas dibandingkan Desa Braja Harjosari dan Desa Rantau Jaya Udik II. Pemanfaatan lahan non pertanian menunjukkan Desa Rantau Jaya Udik II lebih luas dibandingkan Desa Braja Harjosari dan desa Rantau Jaya Udik II. Data yang dijelaskan tersebut menunjukkan jika mata pencaharian penduduk desa Penyangga TNWK ditunjang dari sektor pertanian yaitu mayoritas sebagai petani dan juga peternak yang dapat terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas lahan dan jenis penggunaan lahan di tiap desa, 2019

Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Pertanian Sawah	38,00	27,00	436,75
Pertanian Non Sawah	65,38	1004,00	299,00
Non Pertanian	2446,31	152,00	339,35

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data mengenai populasi ternak dan jenis ternak di tiap lokasi penelitian menunjukkan jenis ternak sapi potong, kerbau, dan babi lebih banyak

dipelihara di Desa Braja Harjosari. Jenis ternak kambing/domba lebih banyak dipelihara di Desa Rantau Jaya Udik II. Data tersebut tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14. Populasi ternak dan jenis ternak di tiap desa, 2019

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Sapi Potong	332	236	886
Kerbau	-	-	30
Kambing/Domba	1.754	426	652
Babi	-	-	70

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data mengenai jumlah industri pengolahan pada lokasi penelitian tiap desa penyangga menunjukkan untuk jenis industri perumahan hanya berada di Desa Labuhan Ratu VI. Industri kecil dan sedang didominasi di Desa Braja Harjosari. Data tersebut tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15. Jumlah industri pengolahan di tiap desa, 2019

Jenis Industri	Jumlah Industri		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Industri Rumah	-	6	-
Industri Kecil	6	-	65
Industri Sedang	-	-	9
Industri Besar	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data mengenai jumlah fasilitas perdagangan pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa Desa Braja Harjosari memiliki kelengkapan fasilitas perdagangan dari pertokoan, pasar, mini-market, warung kelontong, dan kedai makan. Desa Labuhan Ratu VI didominasi oleh toko/warung kelontong. Restoran hanya terdapat di Desa Rantau Jaya Udik II yang tersaji pada Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16. Jumlah fasilitas perdagangan di tiap desa

Fasilitas Perdagangan	Jumlah Fasilitas Perdagangan		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Kelompok Pertokoan	-	-	1
Pasar	-	-	1
Mini-market/Swalayan	-	-	3
Toko/Warung Kelontong	33	22	127
Restoran/Rumah Makan	7	-	-
Warung/Kedai Makan	-	5	25

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data pada Tabel 17 mengenai sarana lembaga keuangan pada lokasi penelitian menunjukkan hanya terdapat sarana Lembaga Keuangan BMT yang berada di lokasi penelitian. Lembaga keuangan tersebut hanya terdapat di Desa Braja Harjosari.

Tabel 17. Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di tiap desa

Sarana Lembaga Keuangan	Jumlah Sarana Lembaga Keuangan		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
BMT	-	-	4
Bank Umum Pemerintah	-	-	-
Bank Umum Swasta	-	-	-
Bank Pengkreditan Rakyat	-	-	-
Koperasi Unit Desa	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data mengenai jumlah sarana penunjang ekonomi pada lokasi penelitian menunjukkan kelengkapan adanya sarana penunjang ekonomi terdapat di Desa Braja Harjosari. Sarana penunjang ekonomi di Desa Rantau Jaya Udik II hanya terdapat salon kecantikan dan pada Desa Labuhan Ratu VI hanya terdapat persewaan alat pesta dan bengkel mobil/motor. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah sarana penunjang ekonomi di tiap desa

Sarana Penunjang Ekonomi	Jumlah Sarana Penunjang Ekonomi		
	Rantau Jaya Udik II	Labuhan Ratu VI	Braja Harjosari
Pegadaian	-	-	-
ATM	-	-	-
Fotokopi	-	-	10
Studio Foto	-	-	3
Salon Kecantikan	1	-	5
Persewaan Alat Pesta	-	2	1
Bengkel Mobil/	-	3	5
Sepeda Motor			
Reparasi Komputer	-	-	2
Reparasi Alat	-	-	3
Komunikasi			
Reparasi Alat Elektronik	-	-	2

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

Berdasarkan data mengenai kondisi jalan darat dan jarak dari kantor desa ke kecamatan, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi pada lokasi penelitian menjelaskan bahwa jenis permukaan jalan darat lokasi penelitian berupa aspal/beton yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jarak terdekat dari kantor desa ke ke kecamatan terletak di Desa Braja Harjosari, namun terjauh jika menuju Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur dan Ibu Kota Provinsi Lampung. Data tersebut dapat terlihat pada Tabel 19 sebagai berikut.

Tabel 19. Kondisi jalan darat antar desa/kelurahan dan jarak dari kantor desa ke kecamatan, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi

Desa	Jenis Permukaan Jalan	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	Jarak dari Kantor Desa ke Kecamatan (km)	Jarak dari Kantor Desa ke Ibu Kota Kabupaten (km)	Jarak dari Kantor Desa ke Ibu Kota Provinsi (km)
Rantau Jaya Udik II	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun	12,00	10,00	90,00
Labuhan Ratu VI	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun	2,60	26,90	104,90
Braja Harjosari	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun	0,00	30,00	128,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur (2020)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja desa penyangga TNWK ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial (budaya), dan kelembagaan saat ini sebagai berikut.

a) Desa penyangga TNWK yang tertinggal :

Masyarakat memiliki ketergantungan terhadap hutan TNWK. Aktivitas pengambilan kayu bakar dengan intensif rendah masih terjadi karena jarak lokasi desa yang dekat dengan kawasan. Kelompok konservasi hutan TNWK telah tumbuh dan berkembang seperti : Kelompok Tani Hutan, Kelompok Tani Madu, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Penduduk bermatapencaharian sebagai petani kebun dan peternak. Partispasi masyarakat pada pertemuan dan pengambilan keputusan dalam merencanakan pembangunan desa belum optimal. Peran pemerintah desa dalam mencegah kerusakan hutan TNWK belum optimal secara kuantitas maupun kualitas. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga desa belum optimal. Pemerintah desa belum memberikan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat secara berkala.

b) Desa penyangga TNWK yang berkembang :

Masyarakat mengimplementasikan aturan-aturan larangan terhadap terkait tindak ilegal yang merusak hutan TNWK dan berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata. Masyarakat desa membentuk kelompok satgas gajah untuk menangani kasus konflik gajah dengan masyarakat dan memanfaatkan limbah kotoran gajah untuk diolah dijadikan baglog sebagai media tanam. Pemerintah desa bergerak aktif mengajak lembaga desa setempat untuk mewujudkan Visi Desa menjadi Desa Wisata. Pemerintah desa, BUMDES dan Pokdarwis berkolaborasi mengajak

masyarakat dan pemuda-pemudi untuk memasarkan potensi ataupun produk wisata yang berada di desa.

c) Desa penyangga TNWK yang maju :

Bentang alam desa menarik wisatawan mancanegara untuk mendokumentasikan diri dan jika beruntung dapat melihat satwa gajah liar dari jarak dekat saat sedang mencari makan diperbatasan Sungai Kuala Panet. Penduduk bermatapencaharian sebagai petani lahan sawah, peternak, dan memiliki penghasilan tambahan sebagai *tourguide*. Kreativitas masyarakat mampu menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Pemerintah desa dan lembaga desa setempat berkoordinasi secara intensif dalam pembangunan desa wisata, sehingga organisasi Pokdarwis cukup aktif dan baik dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Pemerintah desa membangun kerjasama dengan lembaga luar seperti : BPDAS, DPD RI, Universitas (UNILA, Polinela, IPB) dan mitra TNWK (KHS, Alert, WCS, PILI).

2. Faktor internal dan eksternal Desa Penyangga TNWK dijelaskan sebagai berikut.

a) Desa penyangga TNWK yang tertinggal :

Kekuatan desa yaitu memiliki lahan yang luas di sektor perkebunan dan terdapat peternakan lebah madu yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Kelemahan desa yang perlu diperhatikan yaitu jenis wisata yang ditawarkan masih belum beragam dan koordinasi antar lembaga desa dan masyarakat masih belum komunikatif untuk membangun desa wisata. Peluang yang dimiliki desa yaitu sumber daya alam asri dan makanan khas tradisional menarik wisatawan berkunjung. Ancaman yang menjadi perhatian khusus desa yaitu potensi desa belum tereksplorasi menyeluruh oleh wisatawan .

b) Desa penyangga TNWK yang berkembang :

Kekuatan desa yaitu memiliki fasilitas wisata berupa bangunan rumah joglo, *homestay*, gajebo yang digunakan sebagai tempat masyarakat desa melakukan kegiatan produktif untuk pertunjukan seni, berdagang, dan tempat menginap. Moda transportasi lokal untuk wisatawan berkeliling desa telah tersedia.

Kelemahan desa yang perlu diperhatikan tidak tersedianya fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga wisatawan perlu menyiapkan uang tunai untuk menikmati jenis wisata maupun kuliner yang ditawarkan. Kondisi jalan utama desa juga sebagian besar rusak, sehingga menyulitkan aksesibilitas terutama ketika musim hujan. Peluang yang dimiliki desa yaitu cukup tingginya antusias wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke TNWK. Ancaman yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu belum terbangun mitra desa dari lembaga luar dan platform sosial media dalam meningkatkan daya tarik wisatawan masih pasif.

c) Desa penyangga TNWK yang maju :

Kekuatan desa yaitu memiliki potensi adat dan budaya yang dilestarikan dan kondisi jalan utama desa baik dan mudah diakses karena sebagian besar jalan sudah di aspal. Kelemahan desa yang perlu diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang berada di tempat wisata tidak terawat. Peluang yang dimiliki desa yaitu wisatawan mancanegara berulang kali berkunjung ke desa menikmati jenis wisata yang ditawarkan. Ancaman yang perlu menjadi perhatian khusus yaitu gajah liar berulang kali memasuki wilayah desa, namun belum terdapatnya peraturan desa secara tegas menyikapi permasalahan tersebut.

3. Strategi prioritas pembangunan Desa Penyangga TNWK menuju desa wisata yang berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut.

a) Desa penyangga TNWK yang tertinggal :

Strategi mengoptimalkan peran lembaga desa dengan memanfaatkan *stakeholders* untuk memberikan pengetahuan tentang mengeksplorasi potensi desa kepada masyarakat.

b) Desa penyangga TNWK yang berkembang :

Strategi memanfaatkan kreatifitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam hutan untuk menarik wisatawan minat khusus.

c) Desa penyangga TNWK yang maju :

Strategi meningkatkan kerja sama antar kepala desa dan kepala dusun dalam pembangunan desa wisata.

B. Saran

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka saran yang diberikan adalah

1. Pemberdayaan masyarakat perlu menjadi fokus perhatian pembangunan strategi desa penyangga untuk menjadi desa wisata dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala agar meningkatkan pengetahuan, kualitas hidup, dan partisipasi aktif masyarakat
2. Direktorat Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Kementerian LHK, Bappeda Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten Lampung Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lampung Timur, dan Balai TNWK turut memfasilitasi pengelolaan Kawasan TNWK berbasis pembangunan ekowisata pada desa penyangga TNWK dengan penggunaan sumber daya berkelanjutan yang tidak hanya terfokus menegakkan perlindungan sumber daya hayati.
3. Peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian terkait model pembangunan ekonomi desa penyangga TNWK berbasis Agro Ekowisata

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., dan Murniningtyas, E. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Adisasmita, H. R. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfiaturrahman, P. 2016. Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta 2* (2): 251-267.
- Ardian., Laba, A. R., dan Aswan, A. 2017. Analisis Strategi Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika 1* (14): 14-26
- Ardika, I Gede. 2018. *Kepariwisata Berkelanjutan*. Rintis Jalan Lewat Komunitas.
- Ardilah, T., Makmur, M., dan Hanafi, I. 2015. Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2*(1): 71-77.
- Arham, I., Sjaf, S., dan Darusman, D. 2019. Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmu Lingkungan 2* (17): 245-255
- Asker, S. Boronyak L., Carrard, dan Paddon, M. 2010. *Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual*. Australia: Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.
- ASEAN. 2016. ASEAN Community Based Tourism Standard. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Azizah, I. N., dan Fitra, H. A. 2017. Kajian Peran Masyarakat Sekitar dalam Mendukung Pariwisata Taman Nasional Way Kambas Yang Berkelanjutan. *Journal of Planning and Policy Development 0* (0): 1-12.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur. (2020, Januari 2).
<https://lampungtimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e7a84a2b96d45d487051d00b/kabupaten-lampung-timur-dalam-angka-2021.html>. Retrieved from <https://lampungtimurkab.bps.go.id/>.
- Bakkegaard, R. K., Hogarth, N. J., Bong, I. W., Bosselman, A. S., dan Wunder, S. 2017. Measuring Forest and Wild Product Contributions To Household Welfare: Testing A Scable Household Survey Instrument In Indonesia. *Forest Policy and Economics* 84: 20-28.
- Balai TNWK. (2021, Agustus 3). Retrieved Agustus 3, 2021, from Sibadak.com: <http://sibadak.com/login>
- Bismark, M. 2002. *Integrasi Kepentingan Konservasi dan Kebutuhan Sumber Penghasilan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Prosiding Hasil-Hasil Litbang Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan P3HKA. Bogor.
- Budiharsono, S. 2018. *Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan*. Bogor: IPB Press.
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Dellamanda, Y., Kensari, E., Pratama, H. S. P., Mulandari, H., Iskandar, H. T. N., Alphabettika, M., Maharani, N., Febriani, R. F., Kusmiati, Y. 2018. Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia* 2 (32): 170-176.
- Cooper, C., Fletcehr, J., Gilbert, D., dan S. Wanhill. 1993. *Tourism Principles and Practice*. England: Longman Group Limited.
- David, F. R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep Edisi Ke Tujuh*. Jakarta: Pearson Education Asia Pte. Ltd dan PT. Prenhallindo.
- Diaz, B. L., Gonzales, P. J., dan Romero, C. 2017. Measuring System Sustainability with Multicriteria Methods. *European Journal of Operational Research* 258 (2): 607-616
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2016. *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung Periode 2017-2026*. Lampung: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2018. *Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung Tahun 2018-2023*. Lampung: Kementerian Lngkungan Hidup dan Kehutanan

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta.
- Elviana, E., Mutia, F., dan Yunisya, A. N. 2018. *Upaya Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Kalanganyar Sidoarjo menjadi Desa Wisata*. Seminar Archimarture IPLBI: UPN Veteran Jawa Timur, Oktober 2018.
- Fauzi, A., dan Oxtavius, A. 2014. Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *MIMBAR* 30 (1): 42-52.
- Fauziyah, E., dan Farida. 2020. Strategi Pengembangan UKM Jamu Tradisional Madura Ayu. *AGRISCIENCE* 1 (1): 88-102
- Gajrita, I. P., Susilowai, Indah, Soeprbowati, dan Tri, R. 2014. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. *EKOSAINS* 6(1): 47-61.
- Hardilla, D., Basuki, K. H., Rusmiati, F., dan Persada, C. 2021. The Tourism Concept of Emergency Shelter: Strategies for Community Resilience in The Coastal Area of South Lampung. *Atlantis Press*. International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019): 126-130.
- Herdiana, D. 2018. Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif *Participatory Development Planning*. (Disertasi Doktoral, Universitas Padjadjaran, 2018) Diakses dari <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/20536> pada tanggal 19 September 2021.
- Hunger, J., dan Wheelen, T. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- I Wayan S., 2011. Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 2 (15)
- Innes, J.E. dan Booher, D.E. 2010. Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society in Planning with Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy, pp 196-215., Routledge, Oxon.
- Ismail, M., dan Syafitri, W. 2005. Model Pengembangan Agroindustri Unggulan Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah. *Jurnal TEMA* 6 (1): 26-50.
- Jamal, E. 2009. Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian* 28 (1): 7-14.
- Karniastuti, C. 2018. Pemilihan Strategi Pemasaran Desa Wisata Edukasi dengan Metode QSPM. Jakarta: *Prosiding Konferensi Nasional ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah*.

- Khairunnisa, A. 2020. *Implementasi Pariwisata Berkelanjutan dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Persepektif Islam*. Master thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kirana, C. A. D. dan Artisa, R. A. 2018. Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Governance* di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik* 6 (1): 68-84
- Kurniawan, A. A., Ismiyah, E., dan Widyaningrum, D. 2020. Usulan Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Penjualan Kerupuk pada UKM “Dwi Putra” Gresik dengan Menggunakan Matriks SWOT dan QSPM. *Jurnal Sistem dan Teknik Industri*: 205-215
- Kuswanda, W., dan Mukhtar, A. S. 2006. Strategi Pengembangan Kelembagaan Zona Penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 3 (5): 491-504.
- Lase, E., Sihombing, M., dan Thamrin, H. 2018. Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 4 (1): 126-138.
- Mantra, I. B. 2004. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Marthalina. 2019. Pengembangan Kawasan Wisata Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11 (2): 17-41
- Mulyawan, T. M., Barus, B., dan Firdaus, M. 2015. Potensi Ekonomi dan Arah Pengembangan Perekonomian Wilayah Di Desa-Desa Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Tanah Lingkungan* 17 (1): 25-32.
- Musaddad, Aditama A., Rahayu, O. Y., Pratama E., Supraptiningsih., dan Wahyuni, E. 2019. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indoensia. *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 1 (2): 73-93.
- Mustanir, A. 2017. Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG)* (pp. 316-319). South Sulawesi: Atlantis Press.
- Nugroho, S. S., dan Setyowati, N. D. 2017. Model Pengembangan Desa Konservasi Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur. *Jurnal Sosial* 15(1): 61-69
- Nurhasanah, I. S., Alvi, N. N., dan Persada, C. 2017. Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung. *Tata Loka* 19 (2): 117-128.

- Oelrichs, C. M., Lloyd, D. J., dan Christidis, L. 2016. Strategies for mitigating forest arson and elephant conflict in Way Kambas National Park, Sumatra, Indonesia. *Tropical Conservation Science*, 9(2): 565-583.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. (2020, Desember 12). <http://lampungtimurkab.go.id/informasi/geografis>. Retrieved from <http://lampungtimurkab.go.id/>.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2019. *Berita Acara Penetapan Status Desa*. Kabupaten Lampung Timur: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa.
- Persada, C. 2018. *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*. Bandar Lampung: Aura.
- Prabowo, S. E., Hamid, D., dan Prasetya, A. 2016. Analisis Partispasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 33 (2): 18-24.
- Pramana, R. 2019. *Kesesuaian Habitat Gajah Sumatera (Elephas Saximus Sumatranus) Di Taman Nasional Way Kambas Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pramusita, A., dan Sarinastiti, E. N. 2018. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo. *Jurnal Pariwisata Terapan* 2 (1): 14-25
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hutan. 2018. Retrieved from [www.litbang.mnlhk.go.id: http://puslitbanghut.or.id/](http://puslitbanghut.or.id/)
- Putra, I. M. A., Suardani, M., Winaya, I. N. A. P. Widanta, I. M. R. J., Ardika, I W. D. 2020. Pengembangan Desa Wisata Partispatif Mandatori: Studi Kasus pada Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan, Bali. *International Journal of Community Services Learning*. 4 (1): 253-262
- Rahmatullah, R., Endaryanto, T., dan Affandi, M. I. 2021. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGS) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *TATA LOKA* 23 (2): 239-251.
- Rangkuti, F. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. (2020, Juli 18). <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>. Retrieved from [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php?czozMDoiZD0yMDAwKzEyJmY9cHMxMy0yMDEyLnBkZiZqc0xIjs=](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php?czozMDoiZD0yMDAwKzEyJmY9cHMxMy0yMDEyLnBkZiZqc0xIjs=:http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php?czozMDoiZD0yMDAwKzEyJmY9cHMxMy0yMDEyLnBkZiZqc0xIjs=)

- Rizkiyanto, N., dan Topowijono. 2018. Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 58 (2): 20-26
- Saaty, T. L. 1986. *Decision Making for Leaders The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World*. Mervis Hall Pittsburgh: University of Pittsburgh.
- Setijawan, A. 2018. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Persepektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoearth* 1 (3): 7-11
- Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. N., dan Firman, T. 2014. Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif. *Mimbar* 29 (2): 133-144
- Sugiyono, P. D. 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suniastha, A. I. M. 2019. The Role of Tourism Stakeholders at Jasti Tourism Village Development, Karangasem Regency. *International Journal of Social Sciences and Humanities* 1 (2): 20-28.
- Susilo, R. K. D., dan Dharmawan, A. S. 2021. Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Lingkungan. *Jurnal Indonesia Maju* 1 (1): 49-64.
- Tapatfeto, M. A., dan Bessie, J. L. 2018. Strategi Pengembangan Objek Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kunjungan. *Journal of Management (SME's)* 6 (1): 1-20.
- Veriasa, T. O., dan Indraswati, E. 2021. *Hasrat di Tepi Rimba: Memahami Faktor Penentu Sikap dan Perilaku Masyarakat di Pinggiran Taman Nasional*. Jakarta: Asean Center for Biodiversity & Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI Green Network).
- Warpani, S. P., dan Warpani, I. P. 2007. *Pariwisata dalam tata ruang wilayah*. Bandung: ITB.
- Widyarini, S. I., dan Muhamad. 2019. Partispasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). *Jurnal Pariwisata Terapan* 2 (3): 124-135.
- Winingdyah, V. A., Surbakti, A., dan Marpaung, R. R. T. 2018. Perbedaan Pengetahuan Biodiversitas dan Sikap Peduli Lingkungan Antara Peserta Didik di Sekolah Kawasan TNWK. *Jurnal Bioterdidik Wahana Ekspresi Ilmiah* 6 (6).

- Wiyarini, S. I., dan Muhammad. 2019. Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). *Jurnal Pariwisata Terapan* 3 (2): 124-135.
- Wulandari, L. 2017. Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3 (3): 55-66.
- Yusuf, M. 2017. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Gabungan)*. Jakarta: Kencana.
- Zakaria, W. A. 2017. *Membangun Kemandirian Desa*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013.
- Zakaria, W. A., Arifin, B., Murniati, K., dan Indah, L. S. M. 2018. *Pengembangan Potensi Desa Sungai Langka Sebagian Desa Agrowisata Di Kabupaten Pesawaran*. silemit. unila. ac. id.
- Zakaria, W. A., dan Indah, L. S. M. 2021. Pelatihan Manajemen Agrowisata di Desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6 (2): 520-527.